

BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH

(BPMA)



PEDOMAN TATA KERJA

PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI

KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: **KEP-0016/BPMA 00001/2023/BO**

TENTANG

**PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

KEPALA BPMA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, untuk melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh, Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (“PP 23 Tahun 2015”), untuk melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh, Pemerintah dan Pemerintah Aceh membentuk Badan Pengelola Migas Aceh (“BPMA”);
 - c. bahwa berdasarkan PP 23 Tahun 2015, BPMA mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - d. bahwa diperlukan suatu pedoman yang berlaku untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“KKS”) wilayah kewenangan Aceh untuk meningkatkan investasi di Indonesia dan khususnya di Aceh, pengadaan barang dan jasa yang lebih strategis guna memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) lebih besar serta menumbuhkan kembangkan kemampuan lokal dan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
 - e. bahwa kegiatan operasi dihadapkan dengan kondisi *subsurface*, dinamika lingkungan usaha, pengembangan proyek yang memiliki sensitivitas keekonomian tinggi, kegiatan yang dilaksanakan memerlukan ketersediaan pembeli hasil produksi minyak dan gas bumi, serta dalam rangka mengantisipasi resiko yang lebih tinggi sehingga diperlukan kepastian usaha bagi Kontraktor KKS sesuai dengan prinsip KKS dengan mempertimbangkan pembebanan biaya operasi yang objektif;
 - f. bahwa faktor kepentingan operasi sebagai mana terdapat pada huruf d dan e di atas merupakan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan faktor administrasi; dan

- g. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan suatu pedoman yang mengatur pengelolaan rantai suplai melalui Surat Keputusan Kepala BPMA.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh;
 3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8083 K/08/MEM/2016 tentang Persetujuan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Migas Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPMA TENTANG PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Tata Kerja ("PTK") Pengelolaan Rantai Suplai Buku tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk seluruh Kontraktor KKS di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada wilayah kewenangan Aceh.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Deputi Dukungan Bisnis untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap lampiran-lampiran dari PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- KETIGA : Menugaskan kepada Deputi Dukungan Bisnis untuk menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Tender sebagai panduan bagi Kontraktor KKS dalam perencanaan dan pelaksanaan tender, serta secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap Petunjuk Pelaksanaan Tender tersebut.
- KEEMPAT : Dalam hal diperlukan berdasarkan pertimbangan suatu keadaan sebagaimana termaktub dalam konsideran menimbang butir d dan e Surat Keputusan ini, Deputi Dukungan Bisnis dapat membuat suatu keputusan bersifat khusus yang merupakan pengecualian dari ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Tender yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa serta *Good Corporate Governance*.
- KELIMA : Menugaskan Kepala Divisi yang melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kontraktor KKS untuk secara berkesinambungan



**BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH
(BPMA)**

melakukan penyempurnaan terhadap PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

KEENAM : Kepala BPMA dapat membuat suatu keputusan bersifat khusus yang merupakan pengecualian dari ketentuan dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui pendekatan komersial keekonomian secara menyeluruh atas kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kontraktor KKS.

Surat Keputusan ini mulai berlaku enam puluh (60) hari sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal **8 Februari 2023**

Kepala BPMA,

Teuku Mohamad Faisal



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman i

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I UMUM	1
1. Maksud dan Tujuan.....	1
2. Ruang Lingkup.....	1
3. Dasar Hukum.....	1
4. Referensi Hukum.....	2
5. Pengertian Istilah	3
BAB II KEBIJAKAN UMUM	11
1. Kebijakan Umum.....	11
2. Keadaan Khusus	11
BAB III KEWENANGAN.....	13
1. Kewenangan Kontraktor KKS dalam Tahap Eksplorasi	13
2. Kewenangan Kontraktor KKS dalam Tahap Eksploitasi.....	13
3. Tata Cara Permintaan Persetujuan	14
4. Pengecualian Permintaan Persetujuan.....	18
BAB IV PENINGKATAN KAPASITAS NASIONAL	19
1. Ketentuan Umum.....	19
2. Kewajiban Penggunaan Barang Produk Dalam Negeri	21
3. Kewajiban Penggunaan Jasa Produk Dalam Negeri.....	21
4. Preferensi Harga	22
5. Pengawasan Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri	24
6. Pembinaan Penyedia Barang/Jasa	24
7. Program Pengembangan Vendor (PPV)	25
BAB V PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA	26



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman ii

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

1. Pejabat Berwenang	26
2. Pengguna Barang/Jasa	26
3. Pengelola Pengadaan	27
4. Panitia Tender	29
BAB VI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA.....	33
1. Penyusunan Strategi Pengadaan	33
2. Penyusunan Paket Tender	33
3. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa	35
4. Penyusunan Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>)	44
5. Pengadaan Komoditas Utama.....	45
BAB VII MANAJEMEN KONTRAK	47
1. Manajemen Kontrak	47
2. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK).....	49
3. Penyelesaian Perselisihan	53
4. Penutupan Kontrak	53
BAB VIII PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA	55
1. Pembinaan Penyedia Barang/Jasa	55
2. Pengawasan Penyedia Barang/Jasa	55
3. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa	56
4. Penghargaan Atas Kinerja Penyedia Barang/Jasa	56
5. Kategori Pelanggaran Penyedia Barang/Jasa.....	57
6. Tata Cara Pengenaan dan Periode Sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa	61
BAB IX PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA KONTRAKTOR KKS.....	66
1. Pengawasan Terhadap Kontraktor KKS.....	66
2. Penilaian Kinerja Kontraktor KKS	68
BAB X LAPORAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA.....	69



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman iii

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

1. Laporan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) BPMA	69
2. Laporan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tanpa Melalui Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) BPMA.....	70
 BAB XI PENUTUP	 72

LAMPIRAN



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 1 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

**BAB I
UMUM**

1. Maksud dan Tujuan

- 1.1. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum tata laksana, pedoman pelaksanaan teknis serta administratif yang terintegrasi dan jelas, serta menyamakan pola pikir dan pengertian seluruh pengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah kewenangan Aceh dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga dapat merealisasikan prinsip dasar pengelolaan rantai suplai. Dalam hal KKS *Gross Split*, pedoman ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.2. Tujuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah memperoleh dan mendayagunakan barang/jasa yang dibutuhkan dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, dan tempat secara tepat, efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan, dalam menunjang kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi serta menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian nasional dan daerah khususnya di Provinsi Aceh.

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa meliputi perencanaan pengadaan, proses Tender, manajemen Kontrak, pembinaan penyedia barang/jasa dan penyelesaian perselisihan.
- 2.2. PTK ini berlaku untuk semua kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, kecuali pengadaan tanah, jasa pengacara/konsultan hukum, dan pengadaan asuransi, yang mengikuti ketentuan dalam pedoman khusus yang berlaku untuk pengadaan dimaksud.

3. Dasar Hukum

- 3.1. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 2 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

3.3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8083 K/08/MEM/2016 tentang Persetujuan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Migas Aceh.

3.4. Kontrak Kerja Sama.

4. Referensi Hukum

4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

4.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

4.4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4.5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4.6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jaminan Konstruksi;

4.8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4.9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

4.10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;

4.11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen;

4.12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Tidak Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 3 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 4.13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
- 4.14. Pedoman Tata Kerja 005/SKKMA0000/2018/S0 tentang Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya.

5. Pengertian Istilah

- 5.1. Agen adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 beserta perubahannya.
- 5.2. Agen Tunggal adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 beserta perubahannya.
- 5.3. Anak Perusahaan BUMN adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 beserta perubahannya.
- 5.4. *Approved Manufacturer List (AML)* adalah daftar merek/pabrikasi yang secara teknis hasil produksinya dapat diterima oleh Kontraktor KKS dalam mendukung pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- 5.5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya.
- 5.6. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 beserta perubahannya.
- 5.7. Bank BUMN/BUMD adalah Bank Umum yang berstatus Bank Persero dimana sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Aceh.
- 5.8. Bank Umum Swasta Nasional adalah Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia selain Bank BUMN/BUMD.
- 5.9. Barang/Jasa Spesifik adalah barang/jasa atau peralatan yang berdasarkan tuntutan teknis dan/atau persyaratan teknologi dan/atau keahlian tertentu dan/atau kepentingan operasi dan/atau keselamatan dan/atau lisensi jaminan (*warranty*) tidak dapat digantikan dengan barang atau peralatan lain yang sejenis atau hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa tertentu.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 4 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 5.10. Buku APDN (Apresiasi Produk Dalam Negeri) adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.
- 5.11. Calon Peserta Tender adalah Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau diundang untuk mengikuti proses Tender dan belum lulus penilaian kualifikasi.
- 5.12. *Centralized Integrated Vendor Database* (CIVD) adalah sistem *online* untuk pelaksanaan penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa secara terpusat dan terintegrasi antar Kontraktor KKS dan *database* hasil penilaian kualifikasi untuk aspek administrasi, K3LL, dan data kualifikasi lainnya. Bukti penilaian kualifikasi yang telah dilakukan adalah berupa Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA).
- 5.13. Daftar Pengadaan (*Procurement List*) adalah daftar rincian kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kontraktor KKS yang dibuat berdasarkan *Plan of Development* (POD)/*Plan of Further Development* (POFD)/*Put on Production* (POP) yang telah disetujui dan/atau *Work Program & Budget* (WP&B) yang telah disetujui dan/atau rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui BPMA.
- 5.14. Distributor adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 beserta perubahannya.
- 5.15. Dokumen Tender adalah dokumen yang digunakan sebagai pedoman bagi Peserta Tender dalam proses pelaksanaan Tender, yang sekurang-kurangnya berisi tata cara proses Tender dan persyaratan Tender, syarat-syarat kerja (*terms & conditions*), uraian tentang Lingkup Kerja, tata cara evaluasi penawaran, termasuk konsep Kontrak.
- 5.16. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara dua atau lebih Penyedia Barang/Jasa yang dikendalikan langsung oleh pihak yang sama atau Peserta Tender yang lain, yaitu lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama. Penyedia Barang/Jasa yang memiliki Hubungan Istimewa dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya, tidak diperbolehkan secara bersama-sama menjadi peserta yang berkompetisi dalam satu Paket Tender. Ketentuan ini tidak berlaku bagi BUMN/BUMD.
- 5.17. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir, termasuk Konsultansi Konstruksi.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 5 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 5.18. Jasa Lainnya adalah pekerjaan atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.
- 5.19. Kapal adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 beserta perubahannya.
- 5.20. Kartu Pengadaan (*Procurement Card*) adalah kartu kredit Kontraktor KKS yang diterbitkan atas nama pekerja Kontraktor KKS untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa tanpa melalui proses Tender.
- 5.21. Keadaan Darurat (*Emergency*) adalah sebagaimana dimaksud pada Pedoman Tata Kerja SKK Migas 005/SKKMA0000/2018/SO tentang Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya.
- 5.22. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yaitu bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran dan/atau gangguan industri lainnya. Keadaan gangguan industri lainnya dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 5.23. Keadaan Mendesak/Keadaan Darurat Operasi (*Urgent*) adalah sebagaimana dimaksud pada Pedoman Tata Kerja SKK Migas 005/SKKMA0000/2018/SO tentang Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya.
- 5.24. Klarifikasi adalah permintaan penjelasan atas materi penawaran selama proses Tender oleh Panitia Tender kepada Peserta Tender, dan hasilnya dicatat dalam risalah rapat.
- 5.25. Konsorsium adalah gabungan dari dua atau lebih Penyedia Barang/Jasa, dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dengan menyatukan sumber daya yang dimiliki para pihak yang bergabung, di mana masing-masing anggota Konsorsium tetap berdiri sendiri-sendiri.
- 5.26. Konsultansi Konstruksi adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 beserta perubahannya.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 6 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 5.27. Kontrak adalah perjanjian pelaksanaan penyediaan barang/jasa antara satu atau lebih Kontraktor KKS dengan Pelaksana Kontrak yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan bersifat mengikat. Kontrak dapat berupa antara lain Surat Pesanan (*Purchase/Service Order*) atau Kontrak Jasa (*Service Contract*).
- 5.28. Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 beserta perubahannya.
- 5.29. Kontraktor adalah satu atau lebih Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagai pemegang Interest yang menandatangani Kontrak Kerja Sama dengan BPMA dalam pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja.
- 5.30. Kontraktor KKS Afiliasi BUMN adalah Kontraktor KKS dengan status badan usaha yang memenuhi persyaratan:
- 5.30.1. Seratus persen sahamnya dimiliki oleh BUMN atau dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN atau gabungan BUMN dengan Anak Perusahaan BUMN; dan
- 5.30.2. Bertindak sebagai pengelola Wilayah Kerja dengan komposisi *Participating Interest* (PI) dimiliki oleh Kontraktor KKS Afiliasi BUMN sebesar seratus persen.
- 5.31. Lingkup Kerja adalah bagian dari Dokumen Tender dan/atau Kontrak yang berisi antara lain uraian tentang spesifikasi dan/atau fungsi barang dan/atau uraian pekerjaan termasuk persyaratan teknis, jumlah/volume, satuan, waktu, metode kerja, tenaga kerja/ahli, serta penggunaan produk dan kompetensi dalam negeri.
- 5.32. Paket Tender adalah satu atau kumpulan beberapa kebutuhan (sub-Paket Tender) barang/jasa yang pengadaannya dilakukan melalui satu proses Tender.
- 5.33. Panitia Tender adalah panitia yang dibentuk dan disahkan oleh Pejabat Berwenang untuk melaksanakan proses Tender barang/jasa.
- 5.34. Pejabat Berwenang adalah pimpinan tertinggi Kontraktor KKS atau pekerja struktural Kontraktor KKS yang telah mendapat pelimpahan sebagian atau keseluruhan kewenangan dan tanggung jawab dari pimpinan tertinggi Kontraktor KKS yang terkait dengan proses Tender barang/jasa. Pelimpahan atau pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan tata cara di masing-masing Kontraktor KKS.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 7 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 5.35. Pekerjaan Konstruksi adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 beserta perubahannya.
- 5.36. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 beserta perubahannya.
- 5.37. Pelaksana Kontrak adalah orang perserorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menyediakan barang/jasa bagi Kontraktor KKS.
- 5.38. Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) adalah perusahaan yang ditunjuk oleh anggota Konsorsium untuk mewakili Konsorsium dengan tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam perjanjian kerja sama Konsorsium.
- 5.39. Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang adalah jasa-jasa yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengeboran/kerja ulang, yang termasuk dan tidak terbatas pada *wireline/slickline*, fluida pengeboran (*drilling fluids*), *coiled tubing*, pemancingan (*fishing*), pengeboran berarah (*directional drilling*), *underbalanced drilling*, pengeboran inti (*core drilling*), penghentian semburan liar (*well killing*), pembersihan sumur (*wellbore cleaning*), penyemenan sumur (*well cementing*), *snubbing*, perforasi (*perforating*), pemasangan liner, pemasangan kepala sumur, pemasangan tubing produksi dan penyekat (*production tubing and packer*), stimulasi sumur (*well stimulation*), penyelaman (*diving*), *remote operating vehicle* (ROV), dan penjangkaran (*anchor handling*).
- 5.40. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kontraktor KKS yang prosesnya mulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
- 5.41. Pengelola Pengadaan adalah fungsi dalam lingkungan organisasi KONTRAKTOR KKS yang mengelola kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
- 5.42. Pengguna Barang/Jasa adalah fungsi dalam lingkungan organisasi KONTRAKTOR KKS yang merencanakan kebutuhan dan/atau sebagai pengguna akhir barang/jasa untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya.
- 5.43. Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Usaha Hulu Migas adalah Penyedia Barang/Jasa yang menyediakan jasa yang termasuk dalam kategori jasa kebutuhan utama dengan memenuhi persyaratan:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 8 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 5.43.1. Seratus persen sahamnya dimiliki secara langsung oleh negara Republik Indonesia; atau
- 5.43.2. Seratus persen sahamnya dimiliki secara langsung oleh gabungan antara negara Republik Indonesia dan/atau BUMN dan/atau Anak Perusahaan BUMN yang seratus persen sahamnya dimiliki oleh BUMN atau gabungan BUMN.
- 5.44. Perselisihan adalah perbedaan pendapat mengenai proses Tender, pelaksanaan Kontrak, dan pasca kontrak yang terjadi antara kontraktor KKS dengan Penyedia Barang/Jasa.
- 5.45. Pertentangan Kepentingan (*Conflict of Interest*) adalah situasi dimana pekerja Kontraktor KKS secara sendiri dan/atau secara bersama-sama, sebagai pribadi atau bertindak untuk kepentingan perusahaan atau afiliasinya, menggunakan kekuasaannya, secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi jalannya proses dan/atau keputusan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengutamakan/menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya dan/atau kroninya dan/atau korporasi (termasuk afiliasinya) dan/atau Penyedia Barang/Jasa tertentu, sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada pedoman ini.
- 5.46. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK) adalah perubahan syarat dan ketentuan Kontrak termasuk namun tidak terbatas pada Lingkup Kerja, nilai Kontrak, dan/atau jangka waktu Kontrak sebelum masa berlaku Kontrak berakhir.
- 5.47. Perusahaan Asing adalah perusahaan yang didirikan bukan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- 5.48. Perusahaan Dalam Negeri adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.
- 5.49. Perusahaan Nasional adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.
- 5.50. Peserta Tender adalah Penyedia Barang/Jasa yang telah dinyatakan lulus Prakuilifikasi atau penilaian kualifikasi oleh Panitia Tender.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 9 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 5.51. Petunjuk Pelaksanaan Tender adalah ketentuan terpisah dari pedoman ini yang diterbitkan oleh BPMA yang mengatur mengenai perencanaan dan pelaksanaan Tender.
- 5.52. Prakualifikasi adalah penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum proses Tender serta hasilnya digunakan untuk menetapkan metode Tender.
- 5.53. Preferensi Harga adalah nilai penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses Tender.
- 5.54. Prinsipal adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 beserta perubahannya.
- 5.55. Produk Dalam Negeri adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.
- 5.56. Proyek adalah kegiatan yang bersifat tidak rutin untuk membangun atau menghasilkan sesuatu yang spesifik/unik dengan batasan waktu mulai dan akhir yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 5.57. SubKontraktor adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menyediakan barang/jasa bagi Pelaksana Kontrak.
- 5.58. Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi (SKUP Migas) adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.
- 5.59. Target Capaian TKDN adalah nilai target TKDN berdasarkan peta jalur (*roadmap*) pencapaian target TKDN per komoditas yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi.
- 5.60. Tender adalah pengajuan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan atau menyediakan barang. Proses Tender dapat dilaksanakan melalui metode pelelangan, pemilihan langsung atau penunjukan langsung.
- 5.61. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.
- 5.62. Tingkat Komponen Dalam Negeri Daerah Aceh yang selanjutnya disingkat ("TKDA") adalah besarnya komponen dalam negeri daerah (berdomisili Aceh) pada barang, jasa



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 10 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

dan gabungan barang dan jasa terhadap total komponen pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa yang dinyatakan dalam persentase.

- 5.63. *Work Program & Budget* (WP&B) adalah pembahasan mengenai aspek teknis dan biaya kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dilaksanakan untuk membahas usulan
- 5.64. Preferensi Harga adalah nilai penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 11 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

**BAB II
KEBIJAKAN UMUM**

1. Kebijakan Umum

- 1.1. Mengutamakan kepentingan operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- 1.2. Mewajibkan penggunaan barang, peralatan, jasa dan sumber daya manusia dalam lokal dan/atau nasional yang memenuhi jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan harga dalam melaksanakan setiap Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.3. Mengusahakan peningkatan kapasitas di Provinsi Aceh serta nasional antara lain melalui upaya peningkatan investasi dan peningkatan peran industri penunjang minyak dan gas bumi di dalam negeri dengan berbasis penguasaan teknologi dan rancang bangun.
- 1.4. Memperoleh barang/jasa yang diperlukan secara efektif dan efisien.
- 1.5. Meningkatkan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara strategis antara lain dengan pengadaan bersama antara beberapa atau seluruh Kontraktor KKS yang dapat dilakukan melalui koordinasi BPMA dan/atau SKK Migas.
- 1.6. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di dalam wilayah Aceh.
- 1.7. Melaksanakan sendiri Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola atau melalui Penyedia Barang/Jasa.
- 1.8. Membina kemampuan berusaha dan memberikan kesempatan berusaha bagi Perusahaan lokal (Aceh) dan Perusahaan Dalam Negeri terutama usaha kecil termasuk koperasi kecil.
- 1.9. Menciptakan iklim persaingan yang sehat, tertib terkendali, dan transparan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.10. Melaksanakan ketentuan K3LL yang berlaku di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- 1.11. Meningkatkan kinerja dan tanggung jawab para perencana, pelaksana, serta pengawas Pengadaan Barang/Jasa.

2. Keadaan Khusus

Apabila terjadi suatu keadaan tidak normal, misalnya akibat perubahan harga minyak mentah dunia atau keadaan lain yang dapat dianggap sebagai suatu keadaan yang tidak normal, BPMA



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 12 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

dapat menerbitkan ketentuan khusus yang berlaku dalam periode waktu tertentu mengenai, antara lain, negosiasi atas harga penawaran atau negosiasi harga Kontrak, melalui surat edaran Kepala BPMA.

**BAB III
KEWENANGAN**

1. Kewenangan Kontraktor KKS dalam Tahap Eksplorasi

Kontraktor KKS dalam tahap eksplorasi berwenang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan Penyedia Barang/Jasa dan pelaporan dengan kewajiban:

- 1.1. Mengikuti syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam PTK ini; dan
- 1.2. Meminta persetujuan kepada BPMA untuk Daftar Pengadaan (*Procurement List*) dengan nilai Paket Tender lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih dari US\$2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada setiap tahun anggaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari WP&B dan revisi WP&B;

2. Kewenangan Kontraktor KKS dalam Tahap Eksploitasi

Kontraktor KKS dalam tahap eksploitasi berwenang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan Penyedia Barang/Jasa dan pelaporan dengan kewajiban:

- 2.1. Mengikuti syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam PTK ini;
- 2.2. Meminta persetujuan kepada BPMA untuk:
 - 2.2.1. Daftar Pengadaan (*Procurement List*) dengan nilai Paket Tender lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih dari US\$2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada setiap tahun anggaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari WP&B dan revisi WP&B;
 - 2.2.2. Rencana Tender sebelum Tender mulai dilaksanakan dengan perkiraan:
 - 2.2.2.1. nilai Paket Tender; atau
 - 2.2.2.2. nilai kumulatif porsi Kontraktor KKS tahap eksploitasi pada pengadaan bersama lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih dari US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat);
 - 2.2.3. Hasil pelaksanaan Tender sebelum pengumuman calon Pemenang Tender, dari Paket Tender atau sub-Paket Tender, dengan:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 14 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 2.2.3.1. nilai penawaran akhir; atau
- 2.2.3.2. nilai kumulatif akhir porsi Kontraktor KKS tahap eksploitasi pada pengadaan bersama lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih dari US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat);
- 2.2.4. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK), dalam hal penambahan nilai Kontrak secara kumulatif melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai awal Kontrak atau lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau lebih dari US\$10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat), kondisi mana yang tercapai lebih dahulu, untuk Kontrak dengan nilai awal lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau lebih dari US\$10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Hal ini berlaku juga untuk setiap kelipatannya;
- 2.2.5. Rencana Prakuifikasi sebelum persetujuan rencana Tender untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dengan nilai lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih dari US\$2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat);
- 2.2.6. Rencana pembatalan proses Tender yang rencana Tendernya telah disetujui oleh BPMA, sebelum Tender dibatalkan;
- 2.2.7. Rencana pembatalan dan/atau pemutusan Kontrak yang hasil pelaksanaan Tendernya telah disetujui secara tertulis oleh BPMA, sebelum Kontrak dibatalkan dan/atau diputus; dan
- 2.2.8. Perubahan rencana Tender yang telah disetujui oleh BPMA, apabila perubahan tersebut mengakibatkan timbulnya tambahan biaya dan/atau mundurnya jadwal pelaksanaan pekerjaan.

3. Tata Cara Permintaan Persetujuan

3.1. Permintaan Persetujuan Daftar Pengadaan (*Procurement List*)

Kontraktor KKS menyampaikan surat resmi kepada BPMA yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang Kontraktor KKS beserta Daftar Pengadaan (*Procurement List*) mengikuti format Lampiran 1 melalui Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) BPMA.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 15 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

3.2. Permintaan Persetujuan Rencana Tender

- 3.2.1. Kontraktor KKS menyampaikan surat resmi kepada BPMA yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang Kontraktor KKS dan dokumen pendukungnya sesuai format *checklist* rencana Tender (Lampiran 3) melalui Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) BPMA.
- 3.2.2. Dalam hal dilakukan Tender bersama, maka permintaan persetujuan rencana Tender diajukan oleh koordinator Tender bersama.
- 3.2.3. Kontraktor KKS harus memulai proses Tender dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat persetujuan BPMA. Apabila setelah masa tersebut terlewati dan proses Tender belum dilaksanakan serta Kontraktor KKS masih memerlukan Tender tersebut, maka Kontraktor KKS melaporkan kepada BPMA dengan dilengkapi justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3.2.4. Jika Kontraktor KKS tidak melaporkan kepada BPMA keterlambatan proses Tender yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat persetujuan BPMA sebagaimana poin 3.2.3 di atas, maka proses Tender dianggap gagal dan Kontraktor KKS wajib menyampaikan kembali Dokumen Rencana Tender.
- 3.2.5. Apabila Kontraktor KKS tetap melanjutkan proses Tender tanpa persetujuan BPMA, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor KKS dan seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan kegiatan Tender dan pelaksanaan Kontrak tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi.

3.3. Permintaan Persetujuan Hasil Pelaksanaan Tender

- 3.3.1. Kontraktor KKS menyampaikan surat resmi kepada BPMA yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang Kontraktor KKS dan dokumen pendukungnya sesuai format *checklist* hasil pelaksanaan Tender (Lampiran 6) melalui Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) BPMA.
- 3.3.2. Persetujuan BPMA berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Kontraktor KKS mencakup lingkup sebagai berikut:
 - 3.3.2.1. Pelaksanaan Tender telah dilaksanakan sesuai PTK Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kontraktor KKS; dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 16 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 3.3.2.2. Pelaksanaan Tender telah dilaksanakan sesuai persetujuan rencana Tender dan perubahannya (apabila ada);
- 3.3.3. Dalam hal BPMA tidak menyetujui usulan persetujuan hasil pelaksanaan Tender, maka:
- 3.3.3.1. Kontraktor KKS melakukan evaluasi ulang atas proses Tender dan/atau atas penawaran-penawaran yang masuk; dan
- 3.3.3.2. Apabila Kontraktor KKS tetap melanjutkan proses Tender tanpa persetujuan tertulis dari BPMA, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor KKS dan seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan kegiatan Tender dan pelaksanaan Kontrak tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi.
- 3.3.4. Nilai persetujuan hasil pelaksanaan Tender tidak menjadi dasar dalam perhitungan nilai penggantian biaya operasi berdasarkan KKS.
- 3.4. Permintaan Persetujuan Perubahan Lingkup Kontrak (PLK)
- 3.4.1. Kontraktor KKS menyampaikan surat resmi kepada BPMA yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang Kontraktor KKS dan dokumen pendukungnya sesuai format *checklist* PLK (Lampiran 7) dan daftar PLK (Lampiran 8) melalui Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) BPMA.
- 3.4.2. Untuk Kontrak kebutuhan operasi dan perawatan (*operation and maintenance*), Kontraktor KKS harus meminta persetujuan tertulis BPMA sebelum PLK dilaksanakan. Jika PLK telah terlebih dahulu dilaksanakan tanpa mengajukan persetujuan BPMA, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR KKS dan seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan kegiatan Tender dan pelaksanaan Kontrak tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi. Ketentuan ini dikecualikan untuk penyelesaian pekerjaan karena terjadinya Keadaan Darurat (*Emergency*), Keadaan Kahar (*Force Majeur*), Keadaan Mendesak/Keadaan Darurat Operasi (*Urgent*), untuk menghindari kehilangan kesempatan mempertahankan tingkat produksi minyak dan/atau gas bumi, atau akan menunda pelaksanaan kegiatan eksplorasi minyak dan/atau gas bumi.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 17 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 3.5. Permintaan Persetujuan Prakuilifikasi Sebelum Persetujuan Rencana Tender.
- 3.5.1. Kontraktor KKS menyampaikan surat resmi kepada BPMA yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang Kontraktor KKS dilengkapi dengan:
- 3.5.1.1. Ringkasan umum Tender yang terdiri dari penjelasan umum, ringkasan Lingkup Kerja dan/atau spesifikasi, serta strategi pengadaan;
- 3.5.1.2. Acuan Daftar Pengadaan (*Procurement List*);
- 3.5.1.3. Perkiraan nilai Paket Tender;
- 3.5.1.4. Strategi, jenis dan masa berlaku Kontrak;
- 3.5.1.5. Rencana tata waktu proses Tender; dan
- 3.5.1.6. Rincian syarat kualifikasi dan tata cara penilaian kualifikasi.
- 3.5.2. Permintaan persetujuan rencana Tender kepada BPMA harus dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah disetujuinya Prakuilifikasi.
- 3.5.3. Apabila pelaksanaan Prakuilifikasi sampai diumumkan hasilnya dan/atau penyampaian permintaan persetujuan rencana Tender kepada BPMA belum dapat dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, maka Kontraktor KKS melaporkan kepada BPMA dengan dilengkapi justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3.6. Waktu Evaluasi dan Pengembalian Permintaan Persetujuan
- 3.6.1. Persetujuan oleh BPMA diterbitkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen dinyatakan diterima dengan lengkap oleh BPMA.
- 3.6.2. Bilamana diperlukan, BPMA dapat memberitahukan kepada Kontraktor KKS bahwa evaluasi memerlukan waktu tambahan 10 (sepuluh) hari kerja.
- 3.6.3. Apabila dalam masa evaluasi BPMA memerlukan tambahan penjelasan (klarifikasi) dan/atau tambahan dokumen pendukung, maka penghitungan jumlah hari evaluasi mulai dihitung setelah penjelasan dapat diterima oleh BPMA dan/atau dokumen tambahan telah diterima oleh BPMA.
- 3.6.4. Apabila sampai dengan batas akhir waktu evaluasi atau jumlah waktu lain yang diberitahukan oleh BPMA, dokumen yang disampaikan tidak sesuai, dan/atau ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 18 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

PTK ini, maka BPMA dapat mengembalikan dokumen permintaan persetujuan kepada Kontraktor KKS.

4. Pengecualian Permintaan Persetujuan

Kontraktor KKS tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari BPMA untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam rangka menanggulangi Keadaan Darurat (*Emergency*).

BAB IV

PENINGKATAN KAPASITAS NASIONAL

1. Ketentuan Umum

- 1.1. Kontraktor KKS, Penyedia Barang/Jasa, dan SubKontraktor wajib menggunakan barang/jasa dalam negeri sebagaimana tercantum dalam:
 - 1.1.1. Buku APDN;
 - 1.1.2. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi perindustrian; dan/atau
 - 1.1.3. AML yang ditetapkan BPMA dan/atau SKK Migas.
- 1.2. Kontraktor KKS dalam menyusun AML wajib mengacu pada butir 1.1. Apabila barang/jasa dalam negeri yang teridentifikasi tidak memenuhi kualitas yang diperlukan, maka Kontraktor KKS dapat mencantumkan barang/jasa luar negeri.
- 1.3. Dalam tahap perencanaan pengadaan barang atau jasa, termasuk dalam tahap *Front End Engineering Design (FEED)*, penentuan spesifikasi kebutuhan barang wajib menggunakan:
 - 1.3.1. Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk barang yang sudah diberlakukan secara wajib oleh instansi pemerintah yang berwenang. Dalam hal barang belum terdapat dalam SNI atau SNI belum diberlakukan secara wajib, dimungkinkan menggunakan standar internasional; dan
 - 1.3.2. Spesifikasi barang sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. Dalam hal tidak memungkinkan menggunakan spesifikasi barang dalam negeri dan dengan pertimbangan kebutuhan operasi, Kontraktor KKS dapat menentukan spesifikasi di luar spesifikasi barang dalam negeri dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada fungsi yang melaksanakan pengelolaan operasi BPMA dan/atau instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi.
- 1.4. Dalam menyusun rencana Tender barang, Kontraktor KKS harus memperhitungkan waktu produksi dan waktu penyerahan yang wajar dari pabrikan dalam negeri.
- 1.5. Dalam hal kapasitas produksi barang seluruh pabrikan dalam negeri sesuai spesifikasi dan tata waktu yang dibutuhkan Kontraktor KKS terbukti tidak mencukupi,



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 20 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

kekurangannya dapat dipenuhi dengan melakukan Tender yang mengikutsertakan sumber luar negeri.

- 1.6. Dalam menyusun rencana Tender jasa, Kontraktor KKS wajib mensyaratkan standar kualifikasi dan kompetensi minimum tenaga kerja yang akan digunakan mengacu pada ketentuan fungsi yang melaksanakan pengelolaan ketenagakerjaan BPMA dan/atau instansi pemerintah terkait serta Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang berlaku.
- 1.7. Dalam hal terbukti belum terdapat standar kualifikasi dan kompetensi minimum yang ditetapkan oleh BPMA dan instansi pemerintah serta Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kontraktor KKS dapat menentukan standar kualifikasi dan kompetensi sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada fungsi yang melaksanakan pengelolaan ketenagakerjaan BPMA dan/atau instansi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan.
- 1.8. Kontraktor KKS dapat memastikan kualitas barang/jasa dalam negeri yang akan digunakan, antara lain melalui *assessment* dan/atau uji produk dan melaporkan hasilnya kepada BPMA, dengan ketentuan:
 - 1.8.1. *Assessment* dilakukan oleh Kontraktor KKS secara mandiri maupun melalui pihak ketiga dan/atau bersama-sama dengan Kontraktor KKS lain, BPMA dan/atau instansi pemerintah terkait;
 - 1.8.2. Uji produk dilakukan menggunakan laboratorium pengujian dan/atau lembaga penelitian (*research and development/R&D*) dan/atau perguruan tinggi di dalam negeri yang telah memiliki kompetensi dan terakreditasi; dan
 - 1.8.3. Dalam hal laboratorium pengujian dan/atau lembaga penelitian di dalam negeri belum memiliki kompetensi dan terakreditasi, laboratorium dalam negeri dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian internasional yang memiliki kompetensi dan terakreditasi.
- 1.9. Kontraktor KKS mengupayakan kerjasama pengembangan produksi barang kebutuhan Kontraktor KKS dengan pabrikan dalam negeri atau jasa hasil pengembangan teknologi pekerjaan dengan penyedia jasa di dalam negeri.
- 1.10. BPMA dapat melakukan koordinasi dengan Kontraktor KKS untuk menyusun program peningkatan penggunaan barang/jasa dalam negeri.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 21 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 1.11. Perusahaan Asing sebagai anggota Konsorsium harus memberikan kontribusi serta melaksanakan alih teknologi dan alih pengetahuan terhadap pengembangan kemampuan Perusahaan Dalam Negeri.
- 1.12. Kontraktor KKS dalam tahap eksploitasi harus melaksanakan pembayaran kepada Pelaksana Kontrak menggunakan Bank BUMN/BUMD. Bagi kontraktor KKS dalam tahap eksplorasi, semua transaksi pembayaran dapat menggunakan Bank BUMN/BUMD atau Bank Umum Swasta Nasional. Ketentuan ini dikecualikan untuk pelaksanaan pembayaran kepada Pelaksana Kontrak yang berstatus Perusahaan Asing.
- 1.13. Kontraktor KKS diwajibkan mengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri dengan menggunakan Penyedia Barang/Jasa yang berdomisili di wilayah operasi Kontraktor KKS dalam rangka untuk pemberdayaan kapasitas daerah dan pengembangan Tingkat Komponen Dalam Negeri Daerah Aceh ("TKDA"). Ketentuan ini tidak dipersyaratkan:
 - 1.13.1 Dalam hal Tender barang/jasa yang menggunakan teknologi atau berisiko tinggi, atau spesifik seperti bahan kimia khusus, perangkat lunak teknologi informasi (*information technology software*), atau barang/jasa yang mempunyai persyaratan khusus, maka dapat disyaratkan untuk diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa golongan usaha tertentu; atau
 - 1.13.2 Apabila dalam CVD, setelah dilakukan Prakuifikasi, atau setelah proses Tender, tidak ada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan.

2. Kewajiban Penggunaan Barang Produk Dalam Negeri

- 2.1. Kewajiban penggunaan barang Produk Dalam Negeri mengacu pada ketentuan dan tahapan Tender barang pada PTK ini dan Petunjuk Pelaksanaan Tender.
- 2.2. Dalam Tender jasa, Kontraktor KKS harus mensyaratkan kewajiban penggunaan barang Produk Dalam Negeri sebagaimana tercantum pada butir 1.1.
- 2.3. Dalam Tender barang yang membutuhkan jasa pemasangan dan jasa pendukung, Kontraktor KKS harus mensyaratkan kewajiban penggunaan kemampuan jasa dalam negeri.
- 2.4. Tata cara perhitungan TKDN barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 22 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

3. Kewajiban Penggunaan Jasa Produk Dalam Negeri

- 3.1. Kontraktor KKS wajib menggunakan jasa dan tenaga kerja dalam negeri dengan:
 - 3.1.1. Menetapkan standar kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja sebagaimana diatur pada butir 1.6;
 - 3.1.2. Mengutamakan tenaga kerja lokal di wilayah daerah operasi Kontraktor KKS;
 - 3.1.3. Mengikutsertakan dan melibatkan Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Nasional dalam pelaksanaan Tender dan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi; dan
 - 3.1.4. Menetapkan persyaratan penggunaan peralatan dan/atau fasilitas kerja di dalam negeri.
- 3.2. Tata cara perhitungan TKDN jasa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi.

4. Preferensi Harga

- 4.1. Pada proses Tender barang diberikan Preferensi Harga berdasarkan nilai TKDN dan berdasarkan status perusahaan sebagai berikut:
 - 4.1.1. Preferensi Harga berdasarkan TKDN barang, diberikan apabila nilai TKDN lebih atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen) dan dibuktikan dengan sertifikat TKDN. Preferensi diberikan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen), dihitung secara proporsional berdasarkan persentase sertifikat TKDN barang dari penawaran Peserta Tender dibandingkan dengan Target Capaian TKDN komoditas barang terkait;
 - 4.1.2. Preferensi Harga tambahan berdasarkan TKDN untuk komoditas barang utama yang memiliki nilai TKDN melebihi peta jalur (*roadmap*) pencapaian target TKDN sebagaimana diatur dalam peraturan instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi. Preferensi tambahan dihitung mengacu kepada rumusan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Tender; dan
 - 4.1.3. Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan, diberikan kepada Peserta Tender berbentuk pabrikan yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri atau Agen atau Distributor yang mewakilinya, dengan total persentase TKDN



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 23 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

minimal 25% (dua puluh lima persen). Preferensi diberikan sebesar 2,5% (dua setengah persen). Status perusahaan dari pabrikaan dibuktikan melalui SKUP Migas yang disampaikan sebagai bagian dokumen penawaran harga.

4.2. Pada proses Tender jasa diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN dan berdasarkan status perusahaan sebagai berikut:

4.2.1. Preferensi Harga berdasarkan TKDN jasa, diberikan apabila komitmen TKDN minimal 30% (tiga puluh persen).

4.2.1.1. Preferensi diberikan setinggi-tingginya 7,5% (tujuh setengah persen), dihitung terhadap unsur biaya jasa dalam negeri, proporsional berdasarkan komitmen TKDN dibandingkan dengan peta jalur (*roadmap*) pencapaian target TKDN untuk komoditas jasa dari Tender yang dilaksanakan.

4.2.1.2. Preferensi diberikan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen), dihitung terhadap unsur biaya barang dalam negeri, proporsional berdasarkan komitmen TKDN barang dari penawaran Peserta Tender dibandingkan dengan peta jalur (*roadmap*) pencapaian target TKDN untuk komoditas jasa dari Tender yang dilaksanakan. Untuk memperoleh preferensi, perlu pembuktian dengan sertifikat TKDN. Pembuktian dengan sertifikat TKDN tidak diperlukan untuk pengadaan jasa konstruksi terintegrasi.

4.2.2. Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan, diberikan bagi Peserta Tender yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri dengan komitmen TKDN minimal 30% (tiga puluh persen).

4.2.2.1. Apabila Peserta Tender adalah Perusahaan Dalam Negeri atau Konsorsium antara Perusahaan Dalam Negeri tanpa melibatkan Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing, maka preferensi diberikan setinggi-tingginya sebesar 7,5% (tujuh setengah persen), secara proporsional terhadap bobot kategori perusahaan sesuai SKUP Migas.

4.2.2.2. Apabila Peserta Tender adalah Perusahaan Dalam Negeri yang melakukan Konsorsium dengan Perusahaan Nasional dan/atau

dengan Perusahaan Asing, dan Perusahaan Dalam Negeri bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*), maka preferensi diberikan setinggi-tingginya sebesar 5% (lima persen), secara proporsional terhadap bobot kategori perusahaan sesuai SKUP Migas.

4.2.2.3. Bobot kategori perusahaan sesuai SKUP Migas dimaksud adalah berdasarkan SKUP Migas yang disampaikan sebagai bagian dokumen penawaran harga, sebagai berikut:

4.2.2.3.1. Perusahaan kategori diutamakan diberikan bobot 100% (seratus persen);

4.2.2.3.2. Perusahaan kategori dimaksimalkan diberikan bobot 70% (tujuh puluh persen);

4.2.2.3.3. Perusahaan kategori diberdayakan diberikan bobot 40% (empat puluh persen); dan

4.2.2.3.4. Perusahaan yang tidak menyampaikan SKUP Migas dalam penawaran harga, diberikan bobot 0% (nol persen).

4.2.3. Preferensi Harga berdasarkan kepemilikan alat kerja utama Produk Dalam Negeri sebesar 15% (lima belas persen), diberikan kepada:

4.2.3.1. Peserta Tender yang dapat menunjukkan bukti sertifikat pembangunan menara pengeboran/kerja ulang (*drilling/workover rig*) di dalam negeri, untuk Tender menara pengeboran/kerja ulang (*drilling/workover rig*); atau

4.2.3.2. Peserta Tender yang dapat menunjukkan bukti sertifikat pembangunan kapal di galangan kapal dalam negeri, untuk Tender jasa kapal.

5. Pengawasan Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri

Dalam rangka memastikan penggunaan barang/jasa dalam negeri oleh Pelaksana Kontrak, Kontraktor KKS melakukan pengawasan pada tahap pelaksanaan Kontrak dengan cara melakukan verifikasi dan mendorong Pelaksana Kontrak untuk memenuhi kewajiban yang disepakati dalam Kontrak terkait dengan kewajiban pemenuhan capaian TKDN dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 25 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

penggunaan barang/jasa dalam negeri. Kontraktor KKS melaporkan pelaksanaan pengawasan ini kepada BPMA sesuai Bab X butir 1.5.

6. Pembinaan Penyedia Barang/Jasa

Dalam rangka meningkatkan standar kerja dan kualitas produk dari Penyedia Barang/Jasa serta untuk meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, BPMA dan Kontraktor KKS melakukan pembinaan kepada Penyedia Barang/Jasa Dalam Negeri, Nasional dan Daerah antara lain termasuk, namun tidak terbatas pada lingkup:

- 6.1. Pembinaan implementasi sistem manajemen mutu;
- 6.2. Pembinaan implementasi sistem manajemen K3LL; dan/atau
- 6.3. Pembinaan melalui pelaksanaan uji produk dalam negeri.

7. Program Pengembangan Vendor (PPV)

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Nasional serta lokal agar dapat memenuhi kebutuhan operasi hulu migas dan mampu bersaing secara regional dan global, serta guna meningkatkan investasi dan mendukung efisiensi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, BPMA dan Kontraktor KKS membuat program pengembangan vendor (PPV) dan evaluasi secara berkala yang akan diatur lebih lanjut secara terpisah.

BAB V

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa harus menyatakan integritas, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan etika pengelolaan rantai suplai, serta menghindari Pertentangan Kepentingan (*Conflict of Interest*).

1. Pejabat Berwenang

- 1.1. Pejabat Berwenang bertanggung jawab atas:
 - 1.1.1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prinsip dasar dan etika bisnis pengelolaan rantai suplai; dan
 - 1.1.2. Kewajiban penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri.
- 1.2. Pejabat Berwenang mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1.2.1. Menyetujui rencana dan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 1.2.2. Memastikan ketersediaan anggaran;
 - 1.2.3. Menyetujui paket-paket barang/jasa yang akan dilaksanakan pengadaannya;
 - 1.2.4. Menetapkan penugasan Panitia Tender;
 - 1.2.5. Menyetujui kriteria, rujukan dan persyaratan Tender;
 - 1.2.6. Menyetujui HPS/OE, jadwal, lokasi pengadaan dan cara pelaksanaan Tender;
 - 1.2.7. Menetapkan pemenang Tender barang/jasa;
 - 1.2.8. Menyetujui dan menandatangani surat tanggapan sanggahan banding;
 - 1.2.9. Menunjuk pemenang Tender barang/jasa;
 - 1.2.10. Menandatangani Kontrak atau surat kuasa kepada penerima kuasa swakelola; dan
 - 1.2.11. Memberikan sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- 1.3. Pejabat Berwenang dilarang menjadi Panitia Tender untuk Paket Tender yang ditetapkan olehnya.

2. Pengguna Barang/Jasa

- 2.1. Pengguna Barang/Jasa bertanggung jawab atas:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 27 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 2.1.1. Perencanaan kebutuhan barang/jasa sesuai prinsip dasar dan etika bisnis pengelolaan rantai suplai;
- 2.1.2. Kewajiban penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri;
- 2.1.3. Pengawasan pelaksanaan Kontrak; dan
- 2.1.4. Pengelolaan dan pemanfaatan barang/jasa secara efektif dan efisien.
- 2.2. Pengguna Barang/Jasa mempunyai tugas dan wewenang:
 - 2.2.1. Menetapkan rencana dan jadwal kebutuhan barang/jasa termasuk anggarannya;
 - 2.2.2. Mengajukan permintaan kebutuhan barang/jasa;
 - 2.2.3. Menyusun rencana kriteria, rujukan dan persyaratan dokumen teknis termasuk ketentuan-ketentuan untuk mengutamakan penggunaan barang, peralatan, jasa dan sumber daya manusia dalam negeri;
 - 2.2.4. Membantu Panitia Tender melakukan evaluasi penawaran teknis dan negosiasi, berdasarkan penugasan oleh Pejabat Berwenang;
 - 2.2.5. Menyusun HPS/OE dan/atau revisinya sesuai dengan ketentuan dalam PTK ini dan Petunjuk Pelaksanaan Tender;
 - 2.2.6. Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Kontrak;
 - 2.2.7. Melakukan usaha-usaha untuk mengutamakan penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri dalam pelaksanaan Kontrak;
 - 2.2.8. Menggunakan asset yang telah diserahterimakan atau jasa yang disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara efektif dan efisien;
 - 2.2.9. Memiliki sertifikat kompetensi sebagai perencana pengadaan yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Professional migas Indonesia (LSP PROMIGAS INDONESIA); dan
 - 2.2.10. Melakukan penutupan Kontrak (*Contract closed-out*).
- 2.3. Dalam hal pengadaan barang stok (*MRO – Maintenance, Repair, and Operation*), satu atau lebih tugas kewenangan di atas dapat dilakukan oleh Divisi Fasilitas Produksi dan Perawatan.

3. Pengelola Pengadaan

- 3.1. Pimpinan tertinggi organisasi Pengelola Pengadaan Kontraktor KKS dalam tahap eksploitasi tidak boleh berada di bawah Pengguna Barang/Jasa. Dalam hal Kontraktor KKS belum dapat melaksanakan ketentuan tersebut maka harus mendapat persetujuan dalam Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK).
- 3.2. Pekerja pada organisasi Pengelola Pengadaan diwajibkan memiliki sertifikat yang masih berlaku untuk melakukan pengelolaan pengadaan di industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Professional Migas Indonesia (LSP PROMIGAS INDONESIA).
- 3.3. Pengelola Pengadaan bertanggung jawab atas:
 - 3.3.1. Perencanaan dan proses pencarian sumber barang/jasa (*sourcing*), perencanaan strategi, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara efektif dan efisien, serta pengadministrasian Kontrak; dan
 - 3.3.2. Melakukan usaha-usaha penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri.
- 3.4. Pengelola Pengadaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 3.4.1. Menyusun rencana Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kebutuhan dari Pengguna Barang/Jasa, dan/atau berdasarkan kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan dan/atau tahun-tahun berikutnya;
 - 3.4.2. Menyiapkan dokumen penilaian kualifikasi dan Dokumen Tender termasuk persyaratan dan tata cara evaluasi Tender berdasarkan data dan masukan dari Pengguna Barang/Jasa dan peraturan/ketentuan terkait;
 - 3.4.3. Melaksanakan Prakuualifikasi dan menyusun daftar Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat Prakuualifikasi untuk diundang mengikuti Tender;
 - 3.4.4. Mengelola data barang/jasa sebagai acuan yang diperlukan antara lain untuk menyusun kebutuhan barang/jasa dan menyusun HPS/OE;
 - 3.4.5. Membantu Panitia Tender dalam melaksanakan tugasnya;
 - 3.4.6. Mengelola administrasi Kontrak;
 - 3.4.7. Menyiapkan dan mengirimkan laporan Pengadaan Barang/Jasa kepada BPMA sesuai ketentuan pada PTK ini; dan
 - 3.4.8. Dapat melakukan Tender dengan ketentuan sebagai berikut:

- 3.4.8.1. Nilai Paket Tender sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau sampai dengan US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat);
- 3.4.8.2. Kewenangan dan tanggung jawab yang sama sebagaimana Panitia Tender;
- 3.4.8.3. Pelaksanaan Tender yang dilakukan oleh pekerja pada Pengelola Pengadaam yang penugasannya ditetapkan oleh Pejabat Berwenang;
- 3.4.8.4. Pekerja yang melakukan Tender harus memiliki sertifikat yang masih berlaku untuk menjadi Panitia Tender di industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Professional Migas Indonesia (LSP PROMIGAS Indonesia);dan
- 3.4.8.5. Dalam hal diperlukan, dapat dibantu oleh pekerja internal Kontraktor KKS yang bukan anggota maupun konsultan berdasarkan penugasan dari Pejabat Berwenang, atau penetapan tugas berdasarkan *standard operating procedure* (SOP) yang diatur internal Kontraktor KKS.

4. Panitia Tender

- 4.1. Panitia Tender harus memiliki sertifikat yang masih berlaku untuk menjadi Panitia Tender di industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Professional Migas Indonesia (LSP-PROMIGAS INDONESIA). Ketentuan keanggotaan Panitia Tender
 - 4.1.1. Kontraktor KKS dalam tahap eksploitasi
 - 4.1.1.1. Jumlah anggota Panitia Tender harus gasal dan sekurang-kurangnya lima orang, yang terdiri dari:
 - 4.1.1.1.1. Ketua merangkap sebagai anggota;
 - 4.1.1.1.2. Sekretaris dari Pengelola Pengadaan merangkap sebagai anggota;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 30 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 4.1.1.1.3. Anggota dari fungsi hukum;
- 4.1.1.1.4. Anggota dari fungsi perencana pekerjaan atau Pengguna Barang/Jasa; dan
- 4.1.1.1.5. Anggota dari fungsi keuangan.
- 4.1.1.2. Persyaratan Panitia Tender
 - 4.1.1.2.1. Ketua bukan berasal dari organisasi Pengguna Barang/Jasa;
 - 4.1.1.2.2. Ketua dan sekretaris harus berkewarganegaraan Indonesia; dan
 - 4.1.1.2.3. Ketua, sekretaris dan anggota harus berstatus Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT).
- 4.1.2. Kontraktor KKS dalam tahap eksplorasi
 - 4.1.2.1. Jumlah anggota Panitia Tender harus gasal dan sekurang-kurangnya tiga orang, yang terdiri dari:
 - 4.1.2.1.1. Ketua merangkap sebagai anggota;
 - 4.1.2.1.2. Sekretaris dari Pengelola Pengadaan atau fungsi hukum merangkap sebagai anggota; dan
 - 4.1.2.1.3. Anggota dari fungsi perencana pekerjaan atau Pengguna Barang/Jasa.
 - 4.1.2.2. Persyaratan Panitia Tender
 - 4.1.2.2.1. Ketua bukan berasal dari organisasi Pengguna Barang/Jasa;
 - 4.1.2.2.2. Ketua harus berkewarganegaraan Indonesia; dan
 - 4.1.2.2.3. Ketua dan sekretaris dapat berstatus Pekerja Waktu Tertentu (PWT), dan bukan pekerja alih daya.
- 4.1.3. Apabila diperlukan, Panitia Tender:
 - 4.1.3.1. Dapat dilengkapi dengan satu orang wakil ketua yang memenuhi syarat sebagaimana ketua dan bertugas menjalankan fungsi ketua dalam hal ketua berhalangan secara tidak tetap;
 - 4.1.3.2. Dapat dibantu oleh pekerja internal kontraktor KKS yang bukan anggota maupun konsultan berdasarkan penugasan dari Pejabat

Berwenang, atau penetapan tugas berdasarkan *standard operating procedure* (SOP) yang diatur internal kontraktor KKS; dan/atau

4.1.3.3. Dalam melaksanakan pekerjaan administrasi dapat dibantu oleh pekerja lain yang bukan anggota Panitia Tender.

4.1.4. Penunjukan Panitia Tender oleh Pejabat Berwenang sekurang-kurangnya harus menyebutkan nama dan fungsi/jabatan yang diwakilinya, termasuk masa penugasan Panitia Tender tersebut. Dalam hal diperlukan, disebutkan Paket Tender yang akan dilaksanakan.

4.2. Panitia Tender bertanggung jawab untuk:

4.2.1. Melaksanakan Tender barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4.2.2. Memahami isi Dokumen Tender sesuai fungsi masing-masing anggota;

4.2.3. Mengutamakan penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri;

4.2.4. Mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Pejabat Berwenang; dan

4.2.5. Memastikan efisiensi biaya dan barang dalam proses pengadaan.

4.3. Panitia Tender mempunyai tugas pokok dan wewenang:

4.3.1. Memastikan dokumen penilaian kualifikasi dan Dokumen Tender termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran telah sesuai dengan ketentuan PTK ini dan Petunjuk Pelaksanaan Tender;

4.3.2. Memastikan keabsahan HPS/OE;

4.3.3. Memastikan dalam Dokumen Tender telah terdapat ketentuan kewajiban penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri;

4.3.4. Menyusun jadwal dan tata cara pelaksanaan serta menentukan tempat pelaksanaan Tender;

4.3.5. Mengumumkan dan/atau mengirimkan undangan Tender;

4.3.6. Melaksanakan dan mengesahkan hasil penilaian kualifikasi;

4.3.7. Memberikan penjelasan serta membuat berita acara pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Tender termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran, tata cara evaluasi, serta menyampaikan perubahan-perubahan Dokumen Tender (apabila ada) kepada Peserta Tender;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 32 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 4.3.8. Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran;
- 4.3.9. Melakukan evaluasi atas penawaran yang masuk, mengadakan Klarifikasi, negosiasi dan menetapkan urutan calon pemenang dan membuat berita acara hasil Tender;
- 4.3.10. Mengumumkan dan/atau memberitahukan kepada Peserta Tender yang tidak lulus evaluasi atas penawaran yang masuk;
- 4.3.11. Mengusulkan calon pemenang Tender kepada Pejabat Berwenang;
- 4.3.12. Mengumumkan pemenang Tender yang telah ditetapkan oleh Pejabat Berwenang;
- 4.3.13. Menjawab protes dan sanggahan Peserta Tender;
- 4.3.14. Melakukan proses penunjukan pemenang;
- 4.3.15. Memberitahukan Tender gagal dan/atau Tender batal;
- 4.3.16. Melakukan proses penandatanganan Kontrak; dan
- 4.3.17. Membuat laporan hasil Tender kepada Pejabat Berwenang.

BAB VI

PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

1. Penyusunan Strategi Pengadaan

Strategi pengadaan disusun dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

- 1.1. *Plan of Development (POD)/Plan of Further Development (POFD)/Put on Production (POP)* dan/atau *Work Program and Budget (WP&B)* dan/atau *Authority For Expenditure (AFE)* dan/atau rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui BPMA;
- 1.2. Pengoptimalan kebutuhan dengan memperhatikan kondisi operasional kontraktor KKS;
- 1.3. Pemanfaatan aset yang dikelola sendiri maupun dikelola oleh kontraktor KKS lain;
- 1.4. Kondisi pasar;
- 1.5. Potensi pengadaan bersama dengan kontraktor KKS lainnya;
- 1.6. Peta jalur (*roadmap*) Target Capaian TKDN;
- 1.7. Penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri serta Perusahaan Dalam Negeri;
- 1.8. Kapasitas produksi barang Produk Dalam Negeri sesuai spesifikasi dan tata waktu yang dibutuhkan, dengan berdasarkan kajian hasil Tender-Tender sebelumnya, kajian kapasitas pabrik oleh lembaga survei independen sebelum pelaksanaan Tender, atau melalui laporan asosiasi yang membawahi industri terkait;
- 1.9. Ketentuan K3LL yang berlaku di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- 1.10. Ketentuan kepabeanan yang berlaku di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan
- 1.11. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyusunan Paket Tender

- 2.1. Kebutuhan barang/jasa dari beberapa jenis kegiatan dan/atau dari beberapa kontraktor KKS, dapat digabungkan dalam satu Paket Tender, dengan syarat:
 - 2.1.1. Dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis, keekonomian, efektivitas dan efisiensi yang dikalkulasikan secara keahlian;
 - 2.1.2. Hasil pertimbangan teknis, keekonomian, efektivitas dan efisiensi yang telah dikalkulasikan harus disampaikan dan mendapat persetujuan BPMA;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 34 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

2.1.3. Bukan merupakan jenis pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil dan menengah, termasuk koperasi kecil/menengah;

2.1.4. Bukan merupakan usaha untuk menghindari kewajiban pemanfaatan produksi/kompetensi dalam negeri; dan

2.1.5. Merupakan komoditas barang sejenis dengan kategori barang yang sama (wajib, non-wajib, atau non-APDN).

Dalam hal dilakukan pengadaan bersama, Paket Tender dapat dibuat menjadi beberapa sub-Paket Tender, dan Kontrak dapat dibuat secara terpisah maupun bersama.

2.2. Pemecahan paket pekerjaan dalam rangka menghindari meminta persetujuan BPMA tidak dibenarkan. Pemecahan paket pekerjaan menjadi beberapa Paket Tender atau sub-Paket Tender dapat dilakukan dalam hal:

2.2.1. Merupakan pemisahan beberapa pekerjaan jasa yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan atau membutuhkan kualifikasi yang berbeda, misalnya pemisahan pekerjaan listrik, mekanik dan sipil dalam suatu Proyek;

2.2.2. Memastikan penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan cara memisahkan paket Produk Dalam Negeri dari paket Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya;

2.2.3. Untuk memenuhi kebutuhan pengisian kembali persediaan;

2.2.4. Merupakan pemberian kesempatan berusaha kepada usaha kecil dan menengah termasuk koperasi kecil/menengah setempat;

2.2.5. Menghindari ketergantungan seluruh pekerjaan kepada satu Penyedia Barang/Jasa; atau

2.2.6. Untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dari lapangan yang berbeda dalam wilayah operasi kontraktor KKS atau dari kontraktor KKS yang berbeda.

2.3. Penyusunan Paket Tender untuk pengadaan barang dengan kategori (wajib, non-wajib, non-APDN) yang berbeda harus dipisahkan sesuai masing-masing kategori.

2.4. Penyusunan Paket Tender untuk pengadaan barang utama dan pendukungnya yang berbeda kategori (wajib, non-wajib, non-APDN), dapat digabungkan dalam satu Paket Tender apabila secara teknis saling terkait, antara lain disebabkan kepemilikan lisensi/hak kepemilikan/*proprietary right* dan/atau keandalan kinerja yang dibuktikan dengan kajian dari fungsi teknis kontraktor KKS. Proses Tender mengikuti ketentuan

yang berlaku untuk kategori dari barang utamanya, dengan tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN untuk barang pendukungnya.

3. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa

3.1. Barang/Jasa dilaksanakan sendiri secara swakelola, menggunakan Kartu Pengadaan (*Procurement Card*), atau dapat pula dilakukan melalui Penyedia Barang/Jasa.

3.1.1. Swakelola

3.1.1.1. Swakelola merupakan pekerjaan yang pelaksanaannya direncanakan, dikerjakan dengan menggunakan tenaga dan peralatan sendiri dan diawasi sendiri atau pelaksanaannya dikuasakan kepada pihak lain.

3.1.1.2. Pelaksanaan swakelola dapat dikuasakan kepada instansi pemerintah, lembaga ilmiah, perguruan tinggi, kelompok masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional. Swakelola tidak dapat dikuasakan kepada badan usaha.

3.1.1.3. Pekerjaan yang dapat dilakukan secara swakelola yaitu pekerjaan penyelenggaraan pendidikan dan latihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya.

3.1.2. Kartu Pengadaan (*Procurement Card*)

3.1.2.1. Dapat digunakan untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sampai dengan US\$10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) untuk setiap transaksi.

3.1.2.2. Pengguna Kartu Pengadaan (*Procurement Card*) adalah pekerja pada Pengelola Pengadaan atau Pengguna Barang/Jasa yang diberi kewenangan untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa.

3.1.2.3. Diterbitkan oleh Bank BUMN/BUMD/Bank Umum Swasta Nasional yang sahamnya dimiliki minimal 50% oleh Bank BUMN.

3.1.3. Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui Penyedia Barang/Jasa, pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan melalui Tender, baik secara konvensional maupun secara elektronik (*e-bidding*), dengan metode pelelangan umum, pemilihan langsung atau penunjukan langsung.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 36 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

Penentuan metode Tender dilakukan berdasarkan hasil Prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa dalam CIVD.

3.2. *Centralized Integrated Vendor Database (CIVD)*

3.2.1. Merupakan sistem *online database* untuk pelaksanaan Prakualifikasi Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan Perusahaan Asing secara terpusat dan terintegrasi antar Kontraktor KKS sebagai syarat keikutsertaan Penyedia Barang/Jasa pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa usaha hulu minyak dan gas bumi.

3.2.2. Penyedia Barang/Jasa mendaftar melalui Kontraktor KKS dengan menyerahkan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam CIVD, antara lain namun tidak terbatas pada:

3.2.2.1. Akta pendirian perusahaan berikut perubahannya yang disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang;

3.2.2.2. Surat Keterangan Domisili;

3.2.2.3. Surat izin usaha yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi terkait;

3.2.2.4. Pengalaman kerja; dan

3.2.2.5. K3LL.

3.2.3. Penentuan golongan usaha

3.2.3.1. Dibuktikan dengan surat izin usaha atau sertifikat yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi.

3.2.3.2. Dalam hal surat izin usaha atau sertifikat tidak mencantumkan golongan usaha, penentuannya mengacu pada Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berlaku.

3.2.3.3. Perusahaan dengan kepemilikan saham asing dan Perusahaan Asing digolongkan sebagai usaha besar.

3.2.4. Kontraktor KKS melakukan verifikasi dan penelitian atas kebenaran data administrasi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa pada saat pendaftaran awal dan pembaruan data.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 37 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 3.2.5. Penyedia Barang/Jasa yang dinyatakan memenuhi syarat dicatat dalam CIVD dan diberi sertifikat pengganti dokumen administrasi (SPDA).
- 3.2.6. Untuk dokumen yang telah habis masa berlakunya, Penyedia Barang/Jasa yang telah terdaftar harus memperbarui data dengan melampirkan dokumen kualifikasi terbaru yang berlaku sebagaimana disyaratkan dalam CIVD.
- 3.3. Prakualifikasi
- 3.3.1. Prakualifikasi dilakukan untuk menilai kesesuaian golongan usaha, subbidang usaha dan pengalaman Penyedia Barang/Jasa dengan Tender yang akan dilaksanakan, serta aspek kualifikasi lainnya, termasuk nilai pengalaman tertinggi bagi Tender golongan usaha besar. Hasil Prakualifikasi digunakan untuk menentukan metode Tender.
- 3.3.2. Kriteria dan tata cara Prakualifikasi mengacu pada ketentuan dokumen penilaian kualifikasi serta ketentuan Tender baik barang maupun jasa sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Tender yang diterbitkan oleh BPMA.
- 3.3.3. Pelaksanaan Prakualifikasi dilakukan dengan mengumumkan dalam sistem CIVD, atau mengundang melalui *e-mail* atau sistem CIVD kepada semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat sesuai dengan data yang tersedia dalam CIVD dan memiliki SPDA yang masih berlaku.
- 3.3.3.1. Panitia Tender menetapkan tanggal, waktu, dan metode penyampaian dokumen Prakualifikasi tambahan di luar CIVD.
- 3.3.3.2. Panitia Tender menginformasikan Penyedia Barang/Jasa yang tidak lulus Prakualifikasi.
- 3.3.3.3. Panitia Tender memberikan waktu bagi Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan klarifikasi atas ketidaklulusan dalam Prakualifikasi.
- 3.3.4. Untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau sampai dengan US\$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat), Prakualifikasi dapat dilakukan dengan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang memiliki SPDA yang masih berlaku untuk mendapatkan satu Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan. Penyedia

Barang/Jasa diwajibkan Perusahaan Lokal yang berdomisili di wilayah provinsi daerah operasi utama.

3.3.5. Untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau sampai dengan US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), Prakualifikasi dapat dilakukan dengan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang memiliki SPDA yang masih berlaku untuk mendapatkan minimal tiga Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan. Penyedia Barang/Jasa diwajibkan Perusahaan Lokal yang berdomisili di wilayah provinsi daerah operasi utama.

3.3.6. Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar/diundang dapat membentuk Konsorsium baik dengan yang mendaftar/diundang maupun dengan yang tidak mendaftar/diundang untuk Prakualifikasi. Bentuk keikutsertaan Calon Peserta Tender baik sendiri-sendiri atau dalam bentuk Konsorsium harus pasti pada saat batas waktu penyampaian dokumen Prakualifikasi tambahan di luar CIVD.

3.3.7. Apabila berdasarkan hasil Prakualifikasi untuk Paket Tender golongan usaha kecil atau usaha menengah tidak ada yang memenuhi persyaratan, maka Prakualifikasi dapat mengikutsertakan Penyedia Barang/Jasa dengan golongan usaha satu tingkat lebih tinggi yang memenuhi persyaratan.

3.4. Tender

3.4.1. Pelelangan Umum

3.4.1.1. Merupakan Tender yang diumumkan secara terbuka untuk umum.

3.4.1.2. Pelelangan umum dapat dilakukan:

3.4.1.2.1. Untuk semua nilai Paket Tender tanpa melakukan Prakualifikasi; atau

3.4.1.2.2. Apabila setelah dilakukan Prakualifikasi, tidak ada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan.

3.4.2. Pemilihan Langsung

Merupakan Tender yang dilaksanakan dengan mengirimkan undangan tertulis kepada semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan Prakualifikasi, apabila minimal ada dua yang memenuhi persyaratan.

3.4.3. Penunjukan Langsung

Merupakan Tender yang dilaksanakan dengan mengirimkan undangan tertulis kepada satu Penyedia Barang/Jasa.

3.4.3.1. Dapat dilakukan untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau sampai dengan nilai US\$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat).

3.4.3.2. Dapat dilakukan untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau lebih dari US\$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat), untuk hal-hal berikut:

3.4.3.2.1. Hanya terdapat satu Penyedia Barang/Jasa yang memiliki SPDA dalam CIVD yang memenuhi persyaratan Prakualifikasi;

3.4.3.2.2. Pekerjaan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi sehubungan dengan telah terjadinya Keadaan Darurat (*Emergency*); atau

3.4.3.2.3. Pengadaan barang kategori diwajibkan dalam Buku APDN, yang diproduksi oleh hanya satu Penyedia Barang/Jasa yang berstatus BUMN atau BUMD.

3.4.3.3. Dapat dilakukan untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau lebih dari US\$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat), dengan justifikasi tertulis dari pimpinan tertinggi Kontraktor KKS, untuk hal-hal berikut:

3.4.3.3.1. Pekerjaan yang diperlukan untuk meningkatkan volume produksi, dan/atau mempercepat kegiatan eksplorasi atau produksi minyak dan/atau gas bumi berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia atau Kepala BPMA;

3.4.3.3.2. Pekerjaan yang apabila tidak segera dilaksanakan akan mengakibatkan kehilangan kesempatan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 40 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

mempertahankan tingkat produksi minyak dan/atau gas bumi atau akan menunda pelaksanaan kegiatan eksplorasi minyak dan/atau gas bumi;

3.4.3.3.3. Pengadaan penelitian, penyediaan, dan operasi penanganan bahan kimia EOR mulai dari tahapan pengujian laboratorium (*laboratory test*), pengujian lapangan (*field test*), Proyek percontohan (*pilot project*), dan implementasi skala penuh (*full scale*);

3.4.3.3.4. Pekerjaan yang berdasarkan ketentuan pemerintah pusat/daerah ditetapkan untuk dilakukan oleh BUMN/BUMD/koperasi;

3.4.3.3.5. Pengadaan Barang/Jasa untuk menanggulangi Keadaan Mendesak;

3.4.3.3.6. Diperlukan kesinambungan (*bridging*) Kontrak yang sedang berjalan, berdasarkan justifikasi bahwa pekerjaan merupakan sejenis dan dapat dilakukan oleh Kontrak dimaksud, sementara pekerjaan dari Kontrak pengganti belum dapat dimulai, dengan ketentuan:

3.4.3.3.6.1. Jangka waktu Kontrak untuk kesinambungan (*bridging*) sampai dengan Kontrak pengganti dapat dimulai secara kumulatif paling lama satu tahun. Jangka waktu dapat diperpanjang dalam rangka memanfaatkan sisa nilai Kontrak apabila dinilai lebih ekonomis daripada menggunakan Kontrak pengganti; dan

3.4.3.3.6.2. Kontrak yang diperoleh dari hasil penunjukan langsung kesinambungan (*bridging*) ini tidak boleh didahului atau dilanjutkan dengan PLK kesinambungan (*bridging*).



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 41 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 3.4.3.3.7. Pengadaan menara pengeboran atau jasa survei seismik lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) pada kondisi hanya terdapat satu menara pengeboran atau kapal seismik yang tersedia di wilayah negara Republik Indonesia sesuai spesifikasi teknis dan waktu kebutuhan;
- 3.4.3.3.8. Pengadaan Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) yang peralatan utama untuk mengerjakan jasa tersebut telah terpasang di menara pengeboran lepas pantai (*offshore* dan *swamp*); atau
- 3.4.3.3.9. Untuk penyewaan ulang rumah, apartemen, kantor, gudang, lapangan penumpukan (termasuk *shore base*) atau pelabuhan, fasilitas dan peralatan produksi, FSO, FPSO, FPU, dan fasilitas yang sejenis fungsinya. Dalam penyewaan ulang ini dimungkinkan perubahan volume penyewaan atau fasilitas pendukungnya.
- 3.4.3.4. Dapat dilakukan untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau lebih dari US\$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat), dengan justifikasi tertulis dari Pejabat Berwenang, untuk hal-hal berikut:
- 3.4.3.4.1. Pengadaan Barang/Jasa Spesifik yang hanya dapat dipenuhi oleh satu pabrikan atau Penyedia Barang/Jasa tertentu, yang memenuhi kriteria:
- 3.4.3.4.1.1. Keterikatan dengan peraturan, kepemilikan lisensi, paten, hak kepemilikan, atau *proprietary right*, termasuk untuk jasa pemasangan/pemeliharaannya; atau
- 3.4.3.4.1.2. Barang/jasa tersebut tidak dapat digantikan oleh barang/jasa lain



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 42 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

dan/atau hanya boleh disediakan oleh
Penyedia Barang/Jasa tertentu.

3.4.3.4.2. Dalam rangka uji coba teknologi dan/atau penggunaan barang/peralatan Produk Dalam Negeri. Pelaksanaan pengadaan harus dilengkapi dengan program uji coba yang lengkap, termasuk volume sesuai kebutuhan uji coba, tata waktu dan kriteria evaluasi, yang disusun Pengguna Barang/Jasa;

3.4.3.4.3. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh satu penyedia Jasa Konsultansi yang telah terbukti berhasil dan dipercaya akan berhasil mencapai target yang ditetapkan oleh kontraktor KKS;

3.4.3.4.4. Jasa untuk pelatihan pekerja;

3.4.3.4.5. Pekerjaan Jasa Konsultansi yang dilakukan konsultan perorangan; atau

3.4.3.4.6. Pekerjaan Jasa Konsultansi yang dilaksanakan oleh pabrikan atau Agen Tunggal peralatan atau permesinan, dalam rangka pengoperasian dan/atau pengelolaan peralatan atau permesinan tersebut. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk tidak memiliki agen/perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia, maka dapat dilakukan penunjukan langsung kepada Perusahaan Asing.

3.4.3.5. Dapat dilakukan oleh Kontraktor KKS Afiliasi BUMN atau beberapa Kontraktor KKS Afiliasi BUMN kepada Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas yang memenuhi persyaratan:

3.4.3.5.1. Memiliki dan/atau menguasai peralatan/fasilitas kerja sendiri. Penguasaan peralatan/fasilitas kerja dapat dilakukan melalui mekanisme pembelian atau *leasing*/sewa beli dan bukan melalui mekanisme sewa; dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 43 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

3.4.3.5.2. Membuat komitmen untuk meningkatkan kapabilitas dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan kontraktor KKS Afiliasi BUMN. Komitmen tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan tertinggi Kontraktor KKS Afiliasi BUMN dengan tembusan kepada Kepala BPMA.

Dalam hal dilakukan pengadaan bersama, maka seluruh anggota Kontraktor KKS yang ikut serta harus berstatus Kontraktor KKS Afiliasi BUMN.

3.4.4. Tender Secara Elektronik (*e-Bidding*)

3.4.4.1. Tender secara elektronik (*e-Bidding*) merupakan pelaksanaan Tender dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan *internet* atau *intranet*) atau *electronic data interchange* (EDI).

3.4.4.2. Kontraktor KKS memfasilitasi usaha kecil termasuk koperasi kecil untuk dapat berpartisipasi dalam *e-Bidding*.

3.4.4.3. Sistem yang digunakan untuk melaksanakan *e-Bidding* ini harus menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi serta memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan rantai suplai.

3.4.4.4. *e-Reverse Auction* (e-RA)

3.4.4.4.1. *e-RA* merupakan metode penyampaian penawaran harga secara elektronik yang dilaksanakan oleh minimal dua Peserta Tender yang telah lulus tahap evaluasi teknis untuk berkompetisi secara *real-time*, dengan cara menyampaikan harga lebih dari satu kali dan bersifat lebih murah, dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

3.4.4.4.2. HPS/OE diberitahukan kepada Peserta Tender setelah selesai pelaksanaan *e-RA*.

3.4.4.4.3. Tidak boleh digunakan untuk Tender jasa tenaga kerja dan jasa boga (*catering*).

3.4.4.4. Selama dalam proses *e-RA*, identitas penawar harga harus dirahasiakan.

4. Penyusunan Daftar Pengadaan (*Procurement List*)

- 4.1. Daftar Pengadaan (*Procurement List*) disusun berdasarkan *Plan of Development* (POD) /*Plan of Further Development* (POFD) / *Put on Production* (POP) dan/atau *Work Program and Budget* (WP&B) dan/atau *Authority For Expenditure* (AFE) dan/atau rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui BPMA.
- 4.2. Daftar Pengadaan (*Procurement List*) berisi informasi status Kontrak dan/atau Paket Tender antara lain:
 - 4.2.1. Kontrak yang sedang berjalan (*active*);
 - 4.2.2. Paket Tender yang proses Tender-nya sedang berjalan (*on-going*);
 - 4.2.3. Paket Tender yang proses Tender-nya akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan atau berikutnya (*future*);
 - 4.2.4. Kontrak yang telah selesai dilaksanakan tahun sebelumnya (*completed*); dan
 - 4.2.5. Paket Tender yang dibatalkan (*anceled*).
- 4.3. Penyusunan Daftar Pengadaan (*Procurement List*) untuk nilai lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih dari US\$2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) menggunakan Lampiran 1, dan untuk nilai dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau US\$100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau sampai dengan US\$2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) menggunakan Lampiran 2.
- 4.4. Pembahasan Daftar Pengadaan (*Procurement List*) dilakukan bersamaan dengan pembahasan WP&B atau WP&B Revisi.
- 4.5. Pelaksanaan Tender yang belum tercantum dalam Daftar Pengadaan (*Procurement List*) atau perubahannya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 4.5.1. Apabila proses Tender barang/jasa dimaksud tidak segera dilaksanakan, akan mengganggu kegiatan eksplorasi dan/atau produksi minyak dan gas bumi kontraktor KKS;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 45 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

4.5.2. Rencana kerja untuk Tender dimaksud harus sudah masuk dalam WP&B tahun berjalan atau telah dilakukan pembahasan dengan fungsi yang melaksanakan pengelolaan perencanaan BPMA; dan

4.5.3. Pelaksanaan Tender tersebut dimasukkan dalam revisi Daftar Pengadaan (*Procurement List*) tahun berjalan atau Daftar Pengadaan (*Procurement List*) tahun berikutnya. Khusus rencana Tender memerlukan persetujuan BPMA, maka kontraktor KKS harus memasukkan rencana pengadaan tersebut dalam Daftar Pengadaan (*Procurement List*) melalui sistem BPMA terlebih dahulu sebelum mengajukan persetujuan rencana Tender.

5. Pengadaan Komoditas Utama

Dalam rangka menciptakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih efektif dan efisien, serta dapat lebih meningkatkan investasi di dalam negeri pada kegiatan penunjang usaha hulu minyak dan gas bumi, ditetapkan jenis-jenis komoditas utama sebagai berikut:

- 5.1. Menara pengeboran/kerja ulang (*drilling/workover rig*);
- 5.2. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi;
- 5.3. Perkapalan (*marine vessel*);
- 5.4. Barang utama; dan
- 5.5. *Turbomachinery*.

Kontraktor KKS dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dimaksud mengikuti Petunjuk Pelaksanaan Tender.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 46 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

**BAB VII
MANAJEMEN KONTRAK**

1. Manajemen Kontrak

- 1.1. Manajemen Kontrak meliputi antara lain kegiatan pelaksanaan Kontrak, administrasi, pengawasan, dan pelaporan Kontrak.
- 1.2. Selama pelaksanaan Kontrak, penanggung jawab Kontrak bertanggungjawab untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Kontrak sesuai dengan lingkup kerja, biaya, jangka waktu dan ketentuan lain yang telah disepakati, antara lain:
 - 1.2.1. Memastikan pelaksanaan pekerjaan oleh Pelaksana Kontrak sesuai dengan Kontrak;
 - 1.2.2. Melakukan evaluasi kinerja pelaksana Kontrak untuk memenuhi spesifikasi pekerjaan dan jangka waktu pelaksanaan, dan memberikan arahan perbaikan jika diperlukan kepada Pelaksana Kontrak;
 - 1.2.3. Memastikan pelaksanaan Kontrak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan/atau kaidah keteknikan yang baku (*standard engineering practices*) serta ketentuan K3LL;
 - 1.2.4. Melakukan pengendalian terhadap Perubahan Lingkup Kontrak (PLK) termasuk pengelolaan administrasinya;
 - 1.2.5. Melaksanakan pengawasan pengeluaran biaya, waktu pelaksanaan kontrak dan tata waktu persiapan kontrak pengganti terhadap kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rutin;
 - 1.2.6. Melakukan pengawasan atas penggunaan fasilitas bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI);
 - 1.2.7. Melakukan pengawasan dan verifikasi realisasi nilai TKDN, komitmen lokasi pengerjaan di wilayah Negara Republik Indonesia, komitmen pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri serta kerja sama dengan usaha kecil/koperasi kecil sesuai Kontrak dengan ketentuan:
 - 1.2.7.1. Kontraktor KKS bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan pencapaian nilai TKDN oleh Pelaksana Kontrak paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kontrak berakhir. Apabila pada tahap



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 47 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

tertentu pencapaian TKDN lebih rendah daripada rencana, Pelaksana Kontrak harus dapat memberikan penjelasan dan sekaligus menyampaikan rencana pemenuhan kekurangan tersebut kepada kontraktor KKS;

- 1.2.7.2. Dalam hal terbukti bahwa Pelaksana Kontrak tidak menyampaikan laporan realisasi pencapaian TKDN setelah melewati 3 (tiga) bulan terhitung sejak Kontrak berakhir, maka Kontraktor KKS diwajibkan untuk menyampaikan surat peringatan yang berlaku selama 2 (dua) bulan;
- 1.2.7.3. Kontraktor KKS wajib menyampaikan surat pemberitahuan atas kewajiban laporan realisasi pencapaian TKDN kepada Pelaksana Kontrak paling lambat terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum kontrak berakhir;
- 1.2.7.4. Verifikasi realisasi nilai TKDN harus dilakukan oleh kontraktor KKS merujuk pada ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi industri minyak dan gas bumi;
- 1.2.7.5. Melakukan pengawasan penggunaan komponen dalam negeri mengacu pada Strategi Pencapaian TKDN yang telah disampaikan oleh Pelaksana Kontrak;
- 1.2.7.6. Khusus untuk Kontrak pengadaan barang kategori wajib dan non-wajib dengan nilai lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih dari US\$2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat), dilakukan pengawasan dengan cara menempatkan pengawas di lokasi produksi (*on site witness*) untuk memastikan proses produksi dilakukan di dalam negeri;
- 1.2.7.7. Pelaksana Kontrak harus memenuhi besaran pernyataan/komitmen TKDN sesuai dengan yang telah tercantum dalam Kontrak:
 - 1.2.7.7.1. Pelaksana Kontrak pada saat serah terima barang harus dapat membuktikan bahwa barang yang diserahkan benar-benar diproduksi di dalam negeri



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 48 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak dan/atau menyerahkan salinan dari sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi perindustrian; dan

1.2.7.7.2. Pelaksana Kontrak harus melaporkan capaian nilai TKDN kepada kontraktor KKS secara berkala sesuai tahapan yang disepakati dalam Kontrak dan/atau pada akhir masa Kontrak, dengan melampirkan perincian perhitungannya yang dibandingkan dengan perincian perhitungan pada Kontrak dan perubahannya jika ada;

Kondisi butir 1.2.7.7.1 dan 1.2.7.7.2 dikecualikan untuk pernyataan/komitmen TKDN sebesar 0% (nol persen).

1.2.8. Mengelola pengeluaran biaya dan memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pelaksana Kontrak sesuai ketentuan Kontrak;

1.2.9. Melakukan konsolidasi data dan menyiapkan laporan berkala terkait dengan manajemen Kontrak; dan

1.2.10. Mengelola administrasi arsip Kontrak termasuk penutupan Kontrak (*close out*), agar semua dokumen terkait tersimpan secara lengkap dan mudah ditemukan. Masa penyimpanan dokumen Kontrak disesuaikan dengan peraturan kearsipan yang berlaku.

1.3. Mengenakan sanksi berupa:

1.3.1. Denda atas keterlambatan penyerahan barang atau pekerjaan dan/atau tidak memenuhi komitmen pencapaian TKDN dan/atau gagal memenuhi ketentuan diperolehnya Preferensi Status Perusahaan (Psp), serta denda lainnya yang ditetapkan di dalam Kontrak. Nilai denda dikurangkan langsung dari nilai pembayaran terakhir atau dengan cara mencairkan sebagian atau seluruh nilai jaminan pelaksanaan atau dengan cara lain yang lebih tepat. Nilai tersebut menjadi pengurang nilai akhir Kontrak; atau

1.3.2. Sanksi administrasi sesuai kategori pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaksana Kontrak.

2. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK)

- 2.1. PLK yang akan dibebankan sebagai biaya operasi berdasarkan KKS harus mengikuti ketentuan dalam PTK ini. Evaluasi dan persetujuan BPMA tidak dapat dijadikan dasar untuk mempengaruhi hak dan kewajiban kontraktual antara kontraktor KKS dan Pelaksana Kontrak.
- 2.2. PLK yang berupa penambahan Lingkup Kerja tidak diizinkan apabila penambahan tersebut merupakan bagian dari kewajiban Pelaksana Kontrak sesuai dengan Kontrak dan/atau hasil proses Tender.
- 2.3. PLK yang berupa penambahan para pihak dari Kontraktor KKS lain dapat dilakukan dalam rangka pemanfaatan Kontrak yang sedang berjalan oleh Kontraktor KKS lain (*farm-in*), misalnya untuk memanfaatkan kapasitas lebih (*excess capacity*) atau waktu jeda (*window/idle*). Pemanfaatan Kontrak yang sedang berjalan yang diperoleh berdasarkan penunjukan langsung oleh Kontraktor KKS Afiliasi BUMN kepada Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN hanya dapat dilakukan oleh Kontraktor KKS Afiliasi BUMN juga.
- 2.4. PLK yang berupa perubahan harga dapat dilakukan dalam hal:
 - 2.4.1. Keadaan Khusus, sesuai surat edaran Kepala BPMA;
 - 2.4.2. Penyesuaian harga satuan, sesuai formula penyesuaian harga satuan yang tercantum dalam Kontrak; atau
 - 2.4.3. Memenuhi ketentuan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah, yang berdampak langsung terhadap Kontrak.
- 2.5. PLK yang berupa perubahan terhadap Lingkup Kerja dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Pejabat Berwenang apabila:
 - 2.5.1. Merupakan pekerjaan yang diperlukan untuk menanggulangi Keadaan Darurat (*Emergency*) atau Keadaan Kahar (*Force Majeure*);
 - 2.5.2. Memenuhi ketentuan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah, yang berdampak langsung terhadap Kontrak;
 - 2.5.3. Diperlukan kesinambungan (*bridging*) Kontrak yang sedang berjalan, berdasarkan justifikasi tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dari fungsi Pengguna Barang/Jasa bahwa pekerjaan merupakan sejenis dan dapat



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 50 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

dilakukan oleh Kontrak dimaksud, sementara pekerjaan dari Kontrak pengganti belum dapat dimulai, dengan ketentuan:

- 2.5.3.1. Jangka waktu PLK kesinambungan (*bridging*) sampai dengan Kontrak pengganti dapat dimulai dan secara kumulatif paling lama satu tahun. Jangka waktu dapat diperpanjang dalam rangka memanfaatkan sisa nilai Kontrak apabila lebih ekonomis daripada menggunakan Kontrak pengganti;
 - 2.5.3.2. Kontraktor KKS harus dapat membuktikan dengan memanfaatkan sisa nilai Kontrak dapat lebih ekonomis, dengan memberikan dokumen pendukung kepada fungsi teknis terkait di BPMA; dan
 - 2.5.3.3. PLK kesinambungan (*bridging*) ini tidak boleh didahului atau dilanjutkan dengan Kontrak hasil penunjukan langsung kesinambungan (*bridging*).
- 2.5.4. Diperlukan perpanjangan jangka waktu penyewaan rumah, apartemen, kantor, gudang, lapangan penumpukan (termasuk *shore base*) atau pelabuhan, fasilitas dan peralatan produksi, FSO, FPSO, FPU, dan fasilitas yang sejenis fungsinya. Dalam perpanjangan jangka waktu penyewaan ini dimungkinkan perubahan volume penyewaan atau fasilitas pendukungnya;
- 2.5.5. Dalam rangka pemanfaatan Kontrak yang sedang berjalan oleh KONTRAKTOR KKS itu sendiri maupun Kontraktor KKS lain (*farm-in*), dengan ketentuan:
- 2.5.5.1. Untuk penyewaan menara pengeboran dan/atau Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang, dengan kumulatif penambahan jumlah sumur setinggi-tingginya sama dengan jumlah sumur pengeboran pada Kontrak awal;
 - 2.5.5.2. Untuk survei seismik, dengan kumulatif penambahan volume setinggi-tingginya sama dengan volume pekerjaan Kontrak awal; atau
 - 2.5.5.3. Dalam hal *farm-in* dinilai lebih ekonomis dibandingkan dengan harga pasar, maka penambahan jumlah sumur atau volume dapat melebihi jumlah dari Kontrak awal;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 51 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 2.5.5.4. Kontraktor KKS harus dapat membuktikan dengan memanfaatkan sisa nilai Kontrak dapat lebih ekonomis, dengan memberikan dokumen pendukung kepada fungsi teknis terkait di BPMA.
- 2.5.6. Diperlukan penambahan volume pekerjaan dalam rangka memanfaatkan waktu jeda (*window/idle*) dari Kontrak yang sedang berlangsung atau waktu jeda yang disepakati dalam rangka pemanfaatan Kontrak yang sedang berjalan oleh Kontraktor KKS lain (*farm-in*);
- 2.5.7. Perubahan tidak dapat diprediksi atau belum dapat dipastikan sebelumnya, akibat kondisi di luar kendali Kontraktor KKS, dan secara teknis merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari Lingkup Kerja Kontrak;
- 2.5.8. Diperlukan penggantian barang/peralatan, berdasarkan justifikasi tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dari fungsi Pengguna Barang/Jasa Kontraktor KKS. Barang/peralatan pengganti minimal harus memenuhi spesifikasi barang/peralatan yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa penambahan nilai Kontrak. Semua biaya tambahan yang timbul akibat penggantian tersebut menjadi tanggung jawab Pelaksana Kontrak; atau
- 2.5.9. Diperlukan penambahan jangka waktu Kontrak dalam rangka memanfaatkan sisa nilai Kontrak, dengan kumulatif penambahan jangka waktu paling lama dua tahun sejak Kontrak awal berakhir.
- 2.6. Secara kumulatif, penambahan nilai Kontrak tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) terhadap nilai Kontrak awal dan tidak boleh lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau tidak boleh lebih dari US\$5.000.000,00 (lima juta dolar Amerika Serikat).
- 2.7. Penambahan nilai Kontrak dapat melebihi dari ketentuan butir 2.6 untuk:
- 2.7.1. Pelaksanaan PLK pada butir 2.5.1 s.d. 2.5.6;
- 2.7.2. Pelaksanaan PLK jasa pengeboran dan Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang maksimal sampai dengan 30% (tiga puluh persen), kecuali pelaksanaan PLK pada butir 2.5.1 s.d. 2.5.6, akibat perbedaan kondisi *subsurface* yang signifikan, dan/atau untuk penyelesaian permasalahan sumuran, berdasarkan pendapat tertulis dari fungsi terkait BPMA; atau



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 52 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 2.7.3. Untuk pelaksanaan PLK Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi maksimal sampai dengan 30% (tiga puluh persen), kecuali pelaksanaan PLK pada butir 2.5.1 dan 2.5.2, dan/atau akibat perubahan informasi/kondisi *subsurface* yang signifikan, berdasarkan pendapat tertulis dari fungsi terkait BPMA.
- 2.8. Perubahan Lingkup Kontrak dan Perubahan Lingkup Kerja (“PLK”) dilakukan dengan syarat mengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri dan mengoptimalkan capaian TKDN.
- 2.8.1. Penurunan nilai TKDN diperbolehkan dalam hal:
- 2.8.1.1. Penambahan volume barang/jasa luar negeri yang tidak dapat dipenuhi oleh barang/jasa dalam negeri; dan/atau
- 2.8.1.2. Pengurangan volume barang/jasa dalam negeri.
- 2.8.2. Kontraktor KKS diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Pelaksana Kontrak atas dampak PLK terhadap pernyataan/komitmen TKDN.
- 2.8.3. Kontraktor KKS wajib melakukan analisa dan perhitungan kembali dalam rangka memastikan kebenaran terhadap pernyataan/komitmen TKDN yang disampaikan oleh Pelaksana Kontrak atas dampak pengajuan PLK.
- 2.8.4. Pelaksana Kontrak menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN sesuai dengan PLK.
- 2.8.5. Verifikasi realisasi pencapaian TKDN dilakukan terhadap Lingkup Kerja awal beserta perubahannya.

3. Penyelesaian Perselisihan

- 3.1. Perselisihan sedapat mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, dengan atau tanpa mediator.
- 3.2. Apabila para pihak memilih penyelesaian dengan menggunakan mediator, mediator yang di tunjuk haruslah berdasarkan kesepakatan para pihak atau penunjukkan sebagaimana peraturan perundang-undangan.
- 3.2. Apabila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka diselesaikan melalui arbitrase di wilayah indonesia atau pengadilan yang dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam dokumen Kontrak.
- 3.3. Apabila terjadi perselisihan antara:

- 3.3.1. Kontraktor KKS dengan Pelaksana Kontrak, maka para pihak yang terlibat harus membebaskan dan melepaskan BPMA dari segala tuntutan/gugatan/klaim yang mungkin timbul; atau
- 3.3.2. Pelaksana Kontrak dengan SubKontraktor/Prinsipal/pekerjanya, maka para pihak yang terlibat harus membebaskan dan melepaskan kontraktor KKS dan/atau BPMA dari segala tuntutan/gugatan/klaim yang mungkin timbul.

4. Penutupan Kontrak

Penanggung jawab Kontrak melakukan kegiatan yang meliputi:

- 4.1. Evaluasi pelaksanaan Kontrak, antara lain:
 - 4.1.1. Penilaian atas tingkat penyelesaian Kontrak, persentase penyelesaian pekerjaan dan kinerjanya;
 - 4.1.2. Memastikan bahwa setiap pekerjaan di luar Lingkup Kerja Kontrak awal, telah dibuatkan amandemen Kontrak; dan
 - 4.1.3. Memastikan bahwa semua Lingkup Kerja, termasuk jika ada PLK, telah diselesaikan;
- 4.2. Verifikasi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak lebih lama dari 3 (tiga) bulan setelah penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan, antara lain:
 - 4.2.1. Pemeriksaan dan serah terima barang, peralatan, bangunan, hasil pelaksanaan pekerjaan, dari Pelaksana Kontrak kepada kontraktor KKS;
 - 4.2.2. Pemeriksaan dan penetapan hak kepemilikan sisa material dan/atau peralatan dan/atau *scrap*/aset/sisa Proyek sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan sesuai lingkup kerja di dalam Kontrak. Dalam hal barang impor yang menggunakan fasilitas importasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, maka sisa material dan/atau peralatan:
 - 4.2.2.1. Menjadi milik kontraktor KKS jika menggunakan jenis Kontrak *lumpsum* atau *turnkey*;
 - 4.2.2.2. Untuk jenis Kontrak selain *lumpsum* atau *turnkey*, mengacu pada PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Keempat tentang Pengelolaan Kepabeanaan;
 - 4.2.3. Melaksanakan ekspor/re-ekspor peralatan sewa yang semula diimpor menggunakan fasilitas dalam rangka pelaksanaan Kontrak sesuai jangka



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 54 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

waktu yang ditetapkan, kecuali peralatan yang disewa tersebut diketahui akan dimanfaatkan oleh kontraktor KKS lain berdasarkan Kontrak bersama atau Kontrak lain; dan

- 4.2.4. Pelaksanaan pembayaran terakhir setelah pelaksana kontrak telah melakukan kewajiban pelaporan capaian realisasi TKDN dan seluruh kewajiban Pelaksana Kontrak, termasuk penyelesaian denda, telah dipenuhi sesuai ketentuan dalam Kontrak.
- 4.3. Verifikasi realisasi TKDN dan status perusahaan Pelaksana Kontrak, realisasi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, dan realisasi pengerjaan di wilayah Republik Indonesia sesuai Kontrak, termasuk pengenaan sanksi finansial terkait.
- 4.4. Pengembalian surat jaminan pelaksanaan kepada Pelaksana Kontrak sesuai ketentuan di dalam Kontrak.

BAB VIII

PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA

1. Pembinaan Penyedia Barang/Jasa

Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja Penyedia Barang/Jasa melalui:

- 1.1. Pembinaan usaha kecil termasuk koperasi kecil dengan memberikan kesempatan berusaha sesuai bidang usahanya;
- 1.2. Pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kinerja Penyedia Barang/Jasa dan kemampuan usaha masyarakat, antara lain tentang:
 - 1.2.1. *Standard Operating Procedure (SOP)* kontraktor KKS;
 - 1.2.2. Peraturan-peraturan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 1.2.3. K3LL;
- 1.3. Pemberian uang muka dalam melaksanakan pekerjaan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil yang mengalami kesulitan *cash flow*;
- 1.4. Penetapan syarat pemberian sebagian pekerjaan dari Penyedia Barang/Jasa usaha besar kepada Penyedia Barang/Jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil di daerah operasi kontraktor KKS; atau
- 1.5. Uji coba Produk Dalam Negeri, pembinaan implementasi sistem manajemen mutu dan sistem manajemen K3LL.

2. Pengawasan Penyedia Barang/Jasa

Pengawasan berupa pemeriksaan dilakukan oleh kontraktor KKS, BPMA atau auditor yang ditunjuk oleh BPMA secara *current* dan *post audit*, termasuk namun tidak terbatas pada kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*, dan/atau *Anti-Bribery and Corruption (ABC)* berdasarkan data *hardcopy* dan data digital.

- 2.1. Lingkup pemeriksaan:
 - 2.1.1. Rangkaian kegiatan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 2.1.2. Kepatuhan atas ketentuan pelaksanaan Kontrak.
- 2.2. Pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *FCPA*, dan/atau *ABC* dapat dilakukan oleh auditor independen dengan ketentuan:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 56 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 2.2.1. Jika diinisiasi oleh kontraktor KKS, maka harus mendapatkan persetujuan BPMA dan biaya pemeriksaan dapat dibebankan sebagai biaya operasi berdasarkan KKS;
- 2.2.2. Jika diinisiasi oleh BPMA, maka BPMA akan memberitahukan dan melibatkan kontraktor KKS dan biaya pemeriksaan dapat dibebankan sebagai biaya operasi berdasarkan KKS; atau
- 2.2.3. BPMA memberitahukan kepada Pelaksana Kontrak mengenai auditor independen yang ditunjuk, dan Pelaksana Kontrak harus menyampaikan data *hardcopy* dan data *digital* kepada auditor independen tersebut.

3. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa

Kinerja Penyedia Barang/Jasa dinilai oleh fungsi terkait di lingkungan kontraktor KKS dengan tata cara penilaian sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada pada masing-masing kontraktor KKS. Dasar dari penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa dapat diukur antara lain berdasarkan:

- 3.1. Ketepatan penyerahan barang/jasa dari segi mutu, waktu dan harga;
- 3.2. Pelaksanaan penerapan K3LL dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- 3.3. Kepatuhan terhadap etika pengelolaan rantai suplai;
- 3.4. Pencapaian TKDN;
- 3.5. Penyelesaian perselisihan dan kewajiban pembayaran kepada SubKontraktor;
- 3.6. Peran aktif terhadap:
 - 3.6.1. Respon undangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan;
 - 3.6.2. Partisipasi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3.6.3. Pemberian informasi, antara lain tentang perkembangan teknologi baru, alat-alat baru dan saran-saran untuk perbaikan proses pengadaan;
- 3.7. Tidak sedang terkena sanksi baik kuning, merah, maupun hitam; atau
- 3.8. Hasil dari audit pengawasan terhadap Penyedia Barang/Jasa.

4. Penghargaan Atas Kinerja Penyedia Barang/Jasa

Kontraktor KKS dapat memberikan penghargaan kepada para Penyedia Barang/Jasa yang tata caranya disesuaikan dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan masing-masing kontraktor KKS, antara lain berupa Surat, piagam atau memento penghargaan dari kontraktor KKS yang bersangkutan.

5. Kategori Pelanggaran Penyedia Barang/Jasa

5.1. Kategori Kuning

- 5.1.1. Membatalkan penawaran yang telah diajukan sebelum pembukaan penawaran harga.
- 5.1.2. Terlambat mengambil dan/atau menandatangani Kontrak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dari batas waktu yang telah ditetapkan KONTRAKTOR KKS.
- 5.1.3. Untuk jenis Kontrak call off order, terlambat menandatangani dan mengembalikan Surat Perintah Kerja (SPK)/*Purchase Order* (PO)/*Service Order* (SO)/*Work Order* (WO) dan jaminan pelaksanaan kepada KONTRAKTOR KKS sesuai batas waktu yang ditetapkan.
- 5.1.4. Memasok barang atau melaksanakan jasa yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan menurut penilaian kontraktor KKS dampak yang timbul tidak berakibat fatal bagi operasi dan K3LL.
- 5.1.5. Terlambat memasok barang atau terlambat melaksanakan jasa sesuai Kontrak dan menurut penilaian kontraktor KKS dampak yang timbul tidak berakibat fatal bagi operasi dan K3LL.
- 5.1.6. Tidak sanggup memasok barang atau tidak melaksanakan jasa sesuai Kontrak yang tidak berakibat pemutusan Kontrak.
- 5.1.7. Telah dikenakan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kontraktor KKS atas kewajiban penyampaian laporan realisasi pencapaian TKDN.
- 5.1.8. Gagal memenuhi nilai TKDN, di mana realisasi TKDN hanya tercapai 90% (sembilan puluh persen) atau lebih dibandingkan komitmen TKDN dalam Kontrak.

5.2. Kategori Merah

- 5.2.1. Terdapat bukti bahwa Penyedia Barang/Jasa memaksa dengan ancaman atau dengan kekerasan terkait dengan proses Tender kepada kontraktor KKS dan/atau pekerja kontraktor KKS.
- 5.2.2. Mengajukan sanggahan atau protes tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau materi sanggahan atau protes tidak disertai dengan bukti yang valid.

- 5.2.3. Membatalkan penawaran atau mengundurkan diri setelah pembukaan penawaran harga.
- 5.2.4. Tidak memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan komersial sampai batas waktu 5 (lima) hari kerja sejak diberitahukan oleh Panitia Tender.
- 5.2.5. Mengundurkan diri, tidak bersedia ditunjuk, tidak memberi jawaban, tidak memberi kepastian atau tidak bersedia menandatangani Kontrak setelah ditunjuk sebagai pemenang Tender.
- 5.2.6. Menolak memasok barang atau melaksanakan pekerjaan setelah penandatanganan Kontrak.
- 5.2.7. Memasok barang atau melaksanakan jasa yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan menurut penilaian kontraktor KKS dampak yang timbul berakibat fatal bagi operasi dan K3LL.
- 5.2.8. Terlambat dalam memasok barang atau terlambat melaksanakan jasa sesuai Kontrak dan menurut penilaian kontraktor KKS dampak yang timbul berakibat fatal bagi operasi dan K3LL.
- 5.2.9. Tidak sanggup memasok barang atau tidak melaksanakan jasa sesuai Kontrak yang berakibat pemutusan Kontrak.
- 5.2.10. Terlambat melakukan pembayaran kepada SubKontraktor lebih dari 30 (tiga puluh hari) hari kalender dari yang diperjanjikan dengan SubKontraktor meskipun telah menerima pembayaran dari kontraktor KKS atas penyelesaian Kontrak.
- 5.2.11. Tidak menyerahkan sebagian Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya kepada usaha kecil seperti yang disepakati dalam Kontrak.
- 5.2.12. Mengalihkan atau mensubkontrakkan kepada pihak lain untuk:
 - 5.2.12.1. Kontrak jasa tenaga kerja;
 - 5.2.12.2. Pekerjaan utama;
 - 5.2.12.3. Lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari nilai jasa pelaksanaan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya kepada Penyedia Barang/Jasa lain; atau
 - 5.2.12.4. Penyediaan barang dalam Kontrak pengadaan barang.

- 5.2.13. Terdapat bukti bahwa Pelaksana Kontrak memasok barang atau melaksanakan pekerjaan jasa dengan mempekerjakan pekerja kontraktor KKS terkait.
- 5.2.14. Dalam melaksanakan pekerjaannya, terbukti melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.2.15. Pelaksana Kontrak yang terbukti memiliki Hubungan Istimewa dengan Peserta Tender lain dalam proses Tender Kontrak tersebut setelah penandatanganan Kontrak. Hal ini dikecualikan bagi Hubungan Istimewa yang terjadi setelah penyampaian dokumen penawaran.
- 5.2.16. Membatalkan secara sepihak jaminan penawaran (*bid bond*), jaminan pelaksanaan (*performance bond*), jaminan uang muka (*advance payment bond*), dan/atau jaminan pemeliharaan (*maintenance bond*) sebelum masa berlakunya habis.
- 5.2.17. Hasil verifikasi pelaksanaan Kontrak sebagai berikut:
- 5.2.17.1. nilai realisasi TKDN kurang dari 90% (sembilan puluh persen) terhadap komitmen TKDN dalam Kontrak;
 - 5.2.17.2. nilai realisasi TKDN lebih rendah dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan pada saat Tender;
 - 5.2.17.3. gagal memenuhi komitmen pengerjaan di wilayah Republik Indonesia; dan/atau
 - 5.2.17.4. gagal memenuhi komitmen pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri.
- 5.2.18. Terdapat bukti bahwa Pelaksana Kontrak tidak menyampaikan laporan realisasi pencapaian TKDN setelah 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Kontrak berakhir.
- 5.2.19. Uang muka yang diterima dari kontraktor KKS tidak sepenuhnya dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan pekerjaan yang tersebut dalam Kontrak, dan mengakibatkan tertundanya pelaksanaan pekerjaan.
- 5.2.20. Terkena sanksi kategori kuning kembali dalam periode sanksi dan masa percobaan kategori kuning sebelumnya.

5.3. Kategori Hitam

- 5.3.1. Pimpinan tertinggi Penyedia Barang/Jasa atau yang dikuasakan sesuai kewenangan, melakukan tindak pidana atas nama Penyedia Barang/Jasa yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang perdagangan dan/atau perpajakan, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewesyde*).
- 5.3.2. Pekerja Penyedia Barang/Jasa yang bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang/Jasa, dinyatakan terbukti melakukan tindakan perbuatan penyuaipan kepada pekerja kontraktor KKS atau melakukan perbuatan kolusi dan/atau nepotisme kepada pekerja kontraktor KKS, berdasarkan hasil pemeriksaan auditor atau fungsi internal lain di kontraktor KKS atau berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewesyde*).
- 5.3.3. Memalsukan/memanipulasi data atau dokumen, berdasarkan keterangan dari pihak yang mengeluarkan data atau dokumen tersebut.
- 5.3.4. Memasok barang palsu, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atau tes yang dilakukan oleh badan independen, instansi yang berwenang, pabrikan atau pihak yang ditunjuk oleh pabrikan.
- 5.3.5. Dinyatakan terbukti melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewesyde*).
- 5.3.6. Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh KONTRAKTOR KKS dan/atau BPMA berdasarkan data hardcopy dan data digital.
- 5.3.7. Penyedia Barang/Jasa dinyatakan terbukti melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran dengan keterlibatan kontraktor KKS secara korporasi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC).



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 61 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 5.3.8. Penyedia Barang/Jasa tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai Kontrak kepada SubKontraktor berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van geweisyde*).
- 5.3.9. Terlambat melakukan pembayaran kepada SubKontraktor lebih dari 180 hari kalender dari yang diperjanjikan dengan SubKontraktor meskipun telah menerima pembayaran dari kontraktor KKS atas penyelesaian Kontrak.
- 5.3.10. Dalam hal Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi FPCI mengharuskan Pelaksana Kontrak FEED mengikuti Tender tahap Pekerjaan Konstruksi EPC/EPCI:
- 5.3.10.1. Pelaksana Kontrak FEED tidak menyampaikan penawaran teknis atau tidak lulus evaluasi teknis Tender tahap Pekerjaan Konstruksi EPC/EPCI; atau
- 5.3.10.2. Pelaksana Kontrak FEED tidak menyampaikan penawaran harga atau tidak lulus evaluasi harga Tender tahap Pekerjaan Konstruksi EPC/EPCI.
- 5.3.11. Dalam hal jaminan penawaran tidak disyaratkan, Peserta Tender mengundurkan diri, tidak bersedia ditunjuk, tidak memberi jawaban, tidak memberi kepastian atau tidak bersedia menandatangani Kontrak setelah ditunjuk sebagai pemenang Tender.
- 5.3.12. Penyedia Barang/Jasa pemenang Tender tidak memenuhi komitmen penggantian bendera menjadi kapal atau menara pengeboran/kerja ulang (*drilling/workover rig*) berbendera Indonesia.
- 5.3.13. Gagal memasok barang atau menyelesaikan pekerjaan sebagai akibat nilai Kontrak yang lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE.
- 5.3.14. Dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian pekerja Penyedia Barang/Jasa maupun orang lain, sebagai akibat kelalaian pekerja sendiri ataupun karena kelalaian perusahaan Penyedia Barang/Jasa.
- 5.3.15. Dinyatakan kalah sebagai hasil penyelesaian Perselisihan dengan kontraktor KKS dan/atau BPMA melalui putusan pengadilan atau arbitrase, terhitung setelah tanggal putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van geweisyde*).

5.3.16. Penyedia barang yang menyampaikan sertifikat TKDN pada saat Tender, namun melakukan importasi untuk barang dalam sertifikat TKDN dimaksud pada saat pelaksanaan Kontrak.

5.3.17. Terkena sanksi kategori merah kembali dalam periode sanksi dan masa percobaan kategori merah sebelumnya.

6. Tata Cara Pengenaan dan Periode Sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa

Sanksi diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dalam rangka pembinaan. Dalam hal Peserta Tender atau Pelaksana Kontrak berbentuk Konsorsium, maka sanksi berlaku kepada semua anggota Konsorsium dan tetap berlaku meskipun perjanjian Konsorsium sudah berakhir. Sanksi administrasi diterapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan oleh kontraktor KKS bahwa pelanggaran telah terjadi dan berlaku sampai berakhirnya periode sanksi. Sanksi administrasi ini tidak menghilangkan kewajiban kontraktor KKS untuk mengenakan sanksi finansial sesuai dengan Kontrak yang berlaku.

6.1. Kategori Kuning

6.1.1. Surat peringatan sanksi kategori kuning ditandatangani oleh Pejabat Berwenang fungsi Pengelola Pengadaan di kontraktor KKS.

6.1.2. Periode sanksi adalah selama enam bulan terhitung sejak diterbitkannya surat sanksi.

6.1.3. Pada periode setelah menjalani setengah periode pengenaan sanksi, Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan pembuktian telah melakukan perbaikan terhadap penyebab pelanggaran kepada kontraktor KKS untuk dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi atas pembuktian perbaikan tersebut, kontraktor KKS dapat mengurangi periode pengenaan sanksi maksimal tiga bulan.

6.1.4. Setelah berakhirnya periode sanksi, Penyedia Barang/Jasa masih harus menjalani periode percobaan selama enam bulan berikutnya.

6.2. Kategori Merah

6.2.1. Surat sanksi kategori merah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang fungsi Pengelola Pengadaan di kontraktor KKS.

6.2.2. Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi kategori merah tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Tender baru di lingkungan kontraktor KKS



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 63 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

yang bersangkutan selama masa satu tahun terhitung sejak diterbitkannya surat sanksi.

6.2.3. Pada periode setelah menjalani setengah periode pengenaan sanksi, Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan pembuktian telah melakukan perbaikan terhadap penyebab pelanggaran kepada kontraktor KKS untuk dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi atas pembuktian perbaikan tersebut, kontraktor KKS dapat mengurangi periode pengenaan sanksi maksimal enam bulan.

6.2.4. Menjelang berakhirnya periode pengenaan sanksi, Penyedia Barang/Jasa mengajukan surat permintaan untuk dapat mengikuti tender di kontraktor KKS bersangkutan dengan menyertakan pembuktian atas perbaikan.

6.2.5. Setelah berakhirnya periode sanksi, Penyedia Barang/Jasa masih harus menjalani periode percobaan selama satu tahun berikutnya.

6.3. Kategori Hitam

6.3.1. Sebelum mengeluarkan sanksi kategori hitam, kontraktor KKS harus mengkonsultasikan dengan BPMA atau badan yang ditetapkan oleh BPMA mengenai rencana pemberian sanksi kategori hitam. BPMA atau badan yang ditetapkan oleh BPMA dapat menyatakan ketidaksetujuan atas rencana pemberian sanksi kategori hitam.

6.3.2. Surat sanksi kategori hitam ditandatangani oleh pimpinan tertinggi di kontraktor KKS.

6.3.3. Penyedia Barang/Jasa tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Tender baru di lingkungan kontraktor KKS yang bersangkutan, selama masa dua tahun terhitung sejak dikeluarkannya surat sanksi untuk pelanggaran pada butir 5.3.9 s.d. 5.3.17.

6.3.4. Penyedia Barang/Jasa tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Tender baru di seluruh kontraktor KKS, selama masa satu tahun terhitung sejak dikeluarkannya surat sanksi untuk pelanggaran pada butir 5.3.1 s.d. 5.3.8 atau terkena sanksi hitam kembali pada masa periode sanksi dan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada angka 6.3.3.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 64 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 6.3.5. Setelah berakhirnya masa sanksi, Penyedia Barang/Jasa masih harus menjalani masa percobaan selama satu tahun berikutnya.
- 6.3.6. Khusus sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan sebagaimana pada butir 5.3.1 s.d. 5.3.4, selain dikenakan sanksi sebagaimana pada butir 6.3.3, kepada individu yang terbukti terlibat dikenakan sanksi tidak diperbolehkan terlibat dalam proses Tender di lingkungan kontraktor KKS yang bersangkutan, selama tiga tahun terhitung sejak dikeluarkannya surat sanksi.
- 6.3.7. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa terkena sanksi kategori hitam oleh BPMA sebagaimana butir 5.3.6, maka:
- 6.3.7.1. Sanksi diterapkan setelah penetapan diterbitkan oleh BPMA; dan
- 6.3.7.2. Periode pengenaan sanksi akan berakhir, jika Penyedia Barang/Jasa menyampaikan kepada kontraktor KKS yang bersangkutan pernyataan bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh BPMA.
- 6.3.8. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa terkena sanksi kategori hitam sebagaimana butir 5.3.8 dan 5.3.9, maka periode pengenaan sanksi akan berakhir, jika Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada SubKontraktor.
- 6.4. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa terkena sanksi kategori merah atau kategori hitam, maka:
- 6.4.1. Kontraktor KKS dapat melanjutkan Kontrak yang sedang berjalan apabila dinilai bahwa pekerjaan dapat dilanjutkan serta diselesaikan oleh Pelaksana Kontrak. Apabila kontraktor KKS menilai bahwa pekerjaan tidak dapat dilanjutkan, maka dapat dilakukan pemutusan Kontrak;
- 6.4.2. Pelaksana Kontrak harus tetap menyelesaikan kewajibannya pada Kontrak yang sedang berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam Kontrak;
- 6.4.3. Peserta Tender yang masih dalam tahap evaluasi dan belum ditunjuk sebagai pemenang Tender berdasarkan surat penunjukan pemenang Tender yang



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 65 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

diterbitkan kontraktor KKS, dinyatakan diskualifikasi pada saat diterimanya pemberitahuan tentang pemberian sanksi; dan

6.4.4. Bagi Penyedia Barang/Jasa berbentuk pabrikan dalam negeri, maka sanksi yang diberikan dapat digantikan dengan pernyataan telah melaksanakan perbaikan dilengkapi dengan bukti perbaikan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa agar pelanggaran yang sama tidak terjadi kembali. Bukti perbaikan ini harus dilaporkan kepada kontraktor KKS yang bersangkutan.

6.5. Sanksi Finansial

Selain sanksi administrasi, kepada Pelaksana Kontrak yang tidak memenuhi komitmen pencapaian TKDN dan/atau gagal memenuhi ketentuan diperolehnya Preferensi Status Perusahaan (Psp), juga dikenakan sanksi finansial.

6.5.1. Pencapaian realisasi nilai TKDN pada pelaksanaan Kontrak, apabila diaplikasikan pada evaluasi penawaran yang tidak mengubah peringkat pemenang. Besarnya sanksi adalah selisih perhitungan harga evaluasi penawaran (HEP) sesuai nilai pernyataan TKDN pada penawaran dengan harga evaluasi penawaran (HEP) berdasar realisasi nilai TKDN.

6.5.2. Pencapaian realisasi nilai TKDN pada pelaksanaan Kontrak, apabila diaplikasikan pada evaluasi penawaran yang mengubah peringkat pemenang. Besarnya sanksi adalah selisih perhitungan harga evaluasi penawaran (HEP) sesuai nilai pernyataan TKDN pada penawaran dengan harga evaluasi penawaran (HEP) berdasar realisasi nilai TKDN. Jika dalam evaluasi harga, nilai penawaran harga Pelaksana Kontrak lebih tinggi dari nilai penawaran harga Peserta Tender lainnya, besarnya sanksi finansial tersebut ditambah selisih nilai penawaran harga Pelaksana Kontrak dengan nilai penawaran terendah.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA KONTRAKTOR KKS

1. Pengawasan Terhadap kontraktor KKS

1.1. Pengawasan dilakukan oleh BPMA, auditor yang ditunjuk oleh BPMA, dan/atau auditor pemerintah secara *pre*, *current* dan *post audit* terhadap lingkup:

1.1.1. Rangkaian kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, termasuk namun tidak terbatas pada kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*, dan/atau *Anti-Bribery and Corruption (ABC)* kepada kontraktor KKS berdasarkan data *hardcopy* dan data *digital*;

1.1.2. Pembinaan terhadap Penyedia Barang/Jasa;

1.1.3. Kepatuhan atas kewajiban pelaporan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa ke BPMA; dan

1.1.4. Kepatuhan kontraktor KKS Afiliasi BUMN terhadap ketentuan penunjukan langsung kepada Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas.

1.2. Apabila berdasarkan hasil audit final ditemukan pelanggaran, maka kepada kontraktor KKS dikenakan sanksi sebagai berikut:

1.2.1. Sanksi administrasi berupa surat peringatan dari BPMA kepada pimpinan tertinggi kontraktor KKS, jika:

1.2.1.1. Proses Tender tidak sesuai dengan ketentuan PTK ini, Petunjuk Pelaksanaan Tender, dan/atau Dokumen Tender;

1.2.1.2. Kontraktor KKS tidak melaksanakan kewajiban untuk meminta persetujuan BPMA dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan pengelolaan Penyedia Barang/Jasa;

1.2.1.3. Kontraktor KKS tidak melaksanakan kewajiban pelaporan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan PTK ini sebanyak tiga kali dalam kurun waktu satu tahun;

1.2.1.4. Kontraktor KKS tidak melaksanakan pembayaran kepada Pelaksana Kontrak sesuai ketentuan dalam Kontrak;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 67 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 1.2.1.5. Kontraktor KKS tidak melaksanakan verifikasi realisasi TKDN dan status perusahaan Pelaksana Kontrak, realisasi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, dan realisasi pengerjaan di wilayah Republik Indonesia sesuai Kontrak;
 - 1.2.1.6. Kontraktor KKS tidak menindaklanjuti hasil penyelesaian perselisihan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - 1.2.1.7. Kontraktor KKS tidak menindaklanjuti penerapan sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa dan/atau personel internal KONTRAKTOR KKS.
- 1.2.2. Sanksi finansial, berupa tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi berdasarkan kontraktor KKS pada periode perhitungan berikutnya, atau setelah wilayah kerja kontraktor KKS dalam tahap eksplorasi dinyatakan komersial untuk dikembangkan, terhadap:
- 1.2.2.1. Seluruh nilai Kontrak, jika tidak tercantum dalam Daftar Pengadaan (*Procurement List*) dan/atau *Plan of Development (POD)/Plan of Further Development (POFD)/Put on Production (POP)* dan/atau *Work Program and Budget (WP&B)* dan/atau rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui BPMA;
 - 1.2.2.2. Bagian biaya yang merupakan kemahalan harga dari suatu proses Tender. Kriteria kemahalan harga adalah sebagai berikut:
 - 1.2.2.2.1. HPS/OE atau revisinya ditetapkan tidak mengacu kepada harga pasar yang wajar; atau
 - 1.2.2.2.2. Penetapan harga Kontrak yang melebihi HPS/OE atau HPS/OE revisi;
 - 1.2.2.3. Seluruh nilai kontrak, jika kontraktor KKS melakukan penunjukan pemenang untuk usulan hasil pelaksanaan Tender yang tidak disetujui BPMA;
 - 1.2.2.4. Biaya pelaksanaan PLK, jika pelaksanaan PLK dimaksud tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam PTK ini;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 68 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 1.2.2.5. Seluruh nilai Kontrak, jika kontraktor KKS tidak bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) untuk Pengadaan Barang/Jasa dari Kontrak dimaksud;
- 1.2.2.6. Sebagian nilai Kontrak, jika Pelaksana Kontrak tidak bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) untuk Pengadaan Barang/Jasa dari Kontrak dimaksud;
- 1.2.2.7. Sebagian hingga seluruh nilai Kontrak, jika kontraktor KKS menandatangani Kontrak lain dengan Penyedia Barang/Jasa yang tidak bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tipikor setelah penetapan sanksi diterbitkan oleh BPMA; atau

2. Penilaian Kinerja kontraktor KKS

BPMA melaksanakan penilaian kinerja kontraktor KKS secara berkala melalui mekanisme penilaian *Key Performance Indicator* (KPI) dalam lingkup rantai suplai yang diberlakukan di seluruh kontraktor KKS tahap eksploitasi. Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat diberikan penghargaan berupa:

- 2.1. Surat atau piagam penghargaan;
- 2.2. Peningkatan kewenangan kontraktor KKS dalam proses Tender yang ditetapkan melalui surat oleh Kepala BPMA dengan batas waktu tertentu; dan/atau
- 2.3. Bentuk penghargaan lainnya yang ditetapkan oleh BPMA.

BAB X

LAPORAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA

1. Laporan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) BPMA

- 1.1. Daftar Pengadaan (*Procurement List*) untuk Paket Tender dengan nilai lebih dari nilai dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau US\$100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau sampai dengan US\$2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), disampaikan pada setiap tahun anggaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari WP&B. Laporan dibuat mengikuti format Lampiran 2.
- 1.2. Laporan bulanan yang disampaikan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya, terdiri dari:
 - 1.2.1. Pengadaan barang, mengikuti format Lampiran 9 dan Lampiran 10;
 - 1.2.2. Pengadaan jasa, mengikuti format Lampiran 11 dan Lampiran 12;
 - 1.2.3. PLK, mengikuti format Lampiran 13;
 - 1.2.4. Penerapan sanksi administrasi pada Penyedia Barang/Jasa, mengikuti format Lampiran 16;
 - 1.2.5. Realisasi Pembelian Produk Bahan Bakar Minyak, mengikuti format Lampiran 18;
 - 1.2.6. Pemakaian pelumas, mengikuti format Lampiran 19; dan
 - 1.2.7. Pemakaian *base mud*, mengikuti format Lampiran 20.
- 1.3. Laporan per kuartal yang disampaikan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya, terdiri dari:
 - 1.3.1. Realisasi pencapaian TKDN dalam pelaksanaan Kontrak, mengikuti format Lampiran 14; dan
 - 1.3.2. Penerapan sanksi finansial pada Penyedia Barang/Jasa, mengikuti format Lampiran 15.
- 1.4. Laporan per semester untuk pencairan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan yang disampaikan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya, mengikuti format Lampiran 17;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 70 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

1.5. Laporan per tahun yang disampaikan paling lambat dua minggu setelah periode tahunan yang akan dilaporkan berakhir, untuk hasil penilaian kinerja kontraktor KKS;

1.6. Laporan terkait Kontrak

1.6.1. Salinan/*copy* Kontrak dengan nilai lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau lebih dari US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) disampaikan paling lambat tiga minggu setelah Kontrak ditandatangani, dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain Lampiran 5; dan

1.6.2. Laporan penutupan Kontrak dengan nilai lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau lebih dari US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) berupa antara lain realisasi nilai Kontrak, realisasi pencapaian TKDN berdasarkan hasil verifikasi, disampaikan paling lambat tiga minggu setelah seluruh hak dan kewajiban para pihak di dalam Kontrak selesai dilaksanakan.

2. Laporan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tanpa Melalui Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) BPMA

2.1. Laporan tertulis secara berkala, paling sedikit satu kali dalam satu tahun, kepada BPMA mengenai pelaksanaan penunjukan langsung oleh kontraktor KKS Afiliasi BUMN kepada Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas, dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*, sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi upaya peningkatan efektivitas dan percepatan proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan; dan

2.1.2. Realisasi komitmen peningkatan kapabilitas, penambahan investasi dalam kepemilikan peralatan/fasilitas kerja, dan/atau penguasaan teknologi oleh Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas.

2.2. Laporan per tahun yang disampaikan setiap tahun paling lambat dua minggu setelah periode tahunan yang akan dilaporkan berakhir, untuk sanggahan banding yang ditembuskan kepada BPMA. Laporan ini disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

**BAB XI
PENUTUP**

1. PTK ini dibuat dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta perubahannya (apabila ada).
2. Lampiran dan formulir sehubungan dengan pelaksanaan PTK ini merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
3. Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PTK ini atau perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
4. Dengan berlakunya PTK ini, maka:
 - 4.1. Proses Tender yang telah dimulai dapat dilanjutkan dengan melakukan penyesuaian pada PTK ini dan Petunjuk Pelaksanaan Tender yaitu terhadap Dokumen Tender untuk tahap pelaksanaan Tender yang belum berjalan/dilaksanakan. Apabila telah melalui tahap penyampaian dokumen penawaran, maka penyesuaian dilakukan terhadap tata laksana proses selanjutnya. Penyesuaian dimaksud disampaikan kepada Peserta Tender;
 - 4.2. Pengenaan sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa oleh kontraktor KKS mengacu pada PTK ini;
 - 4.3. PLK yang diajukan permintaan persetujuannya kepada BPMA:
 - 4.3.1. Sebelum tanggal berlakunya PTK ini, mengacu pada pedoman sebelumnya;
 - 4.3.2. Setelah tanggal berlakunya PTK ini, mengacu pada PTK ini;
 - 4.4. Rencana Tender yang telah disetujui oleh BPMA sebelum tanggal berlaku PTK ini dan belum dimulai, tetap berlaku dan tidak memerlukan persetujuan ulang dari BPMA. Kontraktor KKS melakukan penyesuaian Dokumen Tender mengacu pada PTK ini dan Petunjuk Pelaksanaan Tender;
 - 4.5. Kontraktor KKS menyampaikan penyesuaian dokumen sesuai ketentuan PTK ini dan Petunjuk Pelaksanaan Tender untuk usulan persetujuan yang telah disampaikan kepada BPMA namun belum mendapat persetujuan pada tanggal berlaku pedoman ini;
 - 4.6. Sertifikat Panitia Tender yang diterbitkan sebelum berlakunya pedoman ini masih tetap berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Pedoman ini ditetapkan.
5. Ketentuan Untuk kontraktor KKS *Gross Split*



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 72 dari 73

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 5.1. Kontraktor KKS *Gross Split* dapat bergabung dalam Tender bersama baik sebagai anggota maupun sebagai koordinator dengan mengikuti ketentuan pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Tender;
- 5.2. Kontraktor KKS *Gross Split* dapat bergabung dalam Kontrak yang sedang berjalan (*farm-in*) milik kontraktor KKS atau sebaliknya, apabila Kontrak yang sedang berjalan dibuat melalui proses Tender yang mengikuti pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Tender;
- 5.3. Kontraktor KKS *Gross Split* dapat bergabung dalam CIVD dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam CIVD.
6. Jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan bertentangan dengan ketentuan PTK ini, maka ketentuan PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan peraturan perundang-undangan tersebut akan tetap berlaku.

LAMPIRAN



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman i

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

DAFTAR ISI LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SC-01A DAFTAR PENGADAAN (<i>PROCUREMENT LIST</i>)	1
LAMPIRAN 2 SC-01B DAFTAR PENGADAAN (<i>PROCUREMENT LIST</i>)	2
LAMPIRAN 3 SC-02 <i>CHECKLIST</i> RENCANA TENDER	3
LAMPIRAN 4 SC-03A RINGKASAN RENCANA TENDER	8
LAMPIRAN 5 SC-03B RINGKASAN HASIL PELAKSANAAN TENDER	12
LAMPIRAN 6 SC-04 <i>CHECKLIST</i> HASIL PELAKSANAAN TENDER	23
LAMPIRAN 7 SC-05 <i>CHECKLIST</i> PERUBAHAN LINGKUP KONTRAK (PLK)	27
LAMPIRAN 8 SC-06 DAFTAR PERUBAHAN LINGKUP KERJA (PLK)	30
LAMPIRAN 9 SC-07 LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER BARANG	31
LAMPIRAN 10 SC-08 DAFTAR PELAKSANAAN TENDER BARANG	33
LAMPIRAN 11 SC-09 LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER JASA	34
LAMPIRAN 12 SC-10 DAFTAR PELAKSANAAN TENDER JASA	36
LAMPIRAN 13 SC-11 RINGKASAN PERUBAHAN LINGKUP KONTRAK (PLK)	37
LAMPIRAN 14 SC-12 LAPORAN REALISASI PENCAPAIAN TKDN	38
LAMPIRAN 15 SC-13 LAPORAN PENERAPAN SANKSI FINANSIAL	39
LAMPIRAN 16 SC-14 LAPORAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI	40
LAMPIRAN 17 SC-15 LAPORAN PENCAIRAN JAMINAN PENAWARAN DAN JAMINAN PELAKSANAAN	41
LAMPIRAN 18 SC-16 LAPORAN PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)	42
LAMPIRAN 19 SC-17 LAPORAN PEMAKAIAN PELUMAS	43
LAMPIRAN 20 SC-18 LAPORAN PEMAKAIAN <i>BASE MUD</i>	44



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

**LAMPIRAN 2
DAFTAR PENGADAAN (PROCUREMENT LIST)**

NO. DAFTAR PENGADAAN (NKP)	KODE NOMOR INDUK KONTRAK	JUDUL TENDER/ KONTRAK	LENGKUP PERUSAHAAN (SISIBU)	MEKKE PELAKSANAAN TENDER	JINS KONDISIS ESDM	JINS KONDISIS BPMA	TANGGAL MUKAD RUMAH BANGUN TENDER	TANGGAL PERUMAHAN KONTRAK/ TANGGAL MUKAD KONTRAK	TANGGAL PERIKATAN KONTRAK/ TANGGAL MUKAD KONTRAK	TANGGAL PERIKATAN KONTRAK/ TANGGAL MUKAD KONTRAK	KODE LANS KONTRAK	JERIBAN TENDER/ KONTRAK	TEKUN (%)		PENGALIHAN BREVITARIAN SILULIYATIN	TENCAMAN PENGALIHAN BAYU TAHUN KALINDIR	TENCAMAN PENGALIHAN BAYU TAHUN BIRKUDITA	DASAR RINTASAN KEJIA	JINS KEJIAAN KALINDIR	NAMA ANGGARAN SUSUNAN DALAM WP&B (P&B)	SUDAH KONTRAK OPTRASUS (P&B)	KETERANGAN	NO. PROCICT:	
													TARGET CAPAIAN ESDM	KONTRAK SEBILIANWA										
													TANGGAL PERIKATAN KONTRAK/ TANGGAL MUKAD KONTRAK	TANGGAL PERIKATAN KONTRAK/ TANGGAL MUKAD KONTRAK										

Daftar pengadaan sebagaimana tersebut diatas merupakan daftar rencana kegiatan pengadaan barang/jasa KKKS yang di buat berdasarkan Plan of Development (POD)/ Plan of Further Development (POFD) yang telah disetujui dan/atau rencana kerja/ kegiatan yang disetujui BPMA.

Yang menyatak,
(Nama KKKS)
[jabatan pimpinan tertinggi KKKS]

(nama lengkap)
Keterangan :
1. Daftar Pengadaan (Procurement List) ini hanya digunakan untuk pengadaan dengan nilai lebih besar dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau lebih besar dari US\$ 500.000,00 (lima ratus juta dolar Amerika Serikat) sampai dengan Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau sampai dengan US\$ 250.000,00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat).
2. Daftar Pengadaan (Procurement List) ini bukan merupakan persetujuan pengadaan.
3. Perubahan/Revisi Daftar Pengadaan (Procurement List) dapat dilakukan bersama dengan revisi WP&B pada tahun berjalan dan/atau bersamaan dengan pembahasan WP&B untuk tahun berikutnya.
4. Apabila revisi Daftar Pengadaan (Procurement List) menyebabkan penurunan perkiraan persentase batasan minimal TKDN, harus di lengkapi dengan penjelasan penyebab penurunan tersebut.
5. dll. disesuaikan dengan kebutuhan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 3 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

**LAMPIRAN 3
SC-02 CHECKLIST RENCANA TENDER**

Nama KONTRAKTOR KKS No. Tender				
Judul Tender				
No. Daftar Pengadaan (NDP) No. Rencana Tender (NRT)				
No	Dokumen	Penjelasan Singkat	Status (Ada/ Tidak Ada Tidak Perlu)	Nama File Lampiran (dalam format pdf)
a	b	c	d	e
1.	SC-02	Lampirkan		01. Sc-02.pdf
2.	Surat pengantar asli yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang KONTRAKTOR KKS dan salinannya	Lampirkan Disampaikan informasi berikut ini: a. Nomor surat b. Tanggal surat c. No.Tender d. Judul Tender e. Penjelasan singkat Lingkup Kerja f. Bidang Pekerjaan: Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Konsultansi → Pilih salah satu g. [?] pelaksanaan Tender: Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung → pilih salah satu h. Tata cara penyampaian dokumen penawaran: Sistem Satu Sampul/ Sistem Dua Sampul/ Sistem Dua Tahap → pilih salah satu i. Masa berlaku Kontrak: j. Perkiraan tanggal mulai dan berakhir Kontrak: k. Batasan minimal TKDN: l. Perkiraan nilai paket Tender: lebih dari US\$2,500,000.00 s.d. US\$10,000,000.00 atau lebih dari US\$10,000,000.00 s.d. US\$50,000,000.00 atau lebih dari US\$100,000,000.00 → pilih salah satu m. Dasar rencana Tender: Plan of Development (POD)/Plan of Further Development (POFD)/ Put on Production (POP) dan/atau Work Program and Budget (WP&B) dan/atau rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui BPMA → pilih salah satu n. Narahubung (contact person): sebutkan nama, email, nomor telepon/HP Catatan: Surat pengantar berisi sekurang-kurangnya informasi di atas		02. Surat Pengantar. pdf
3.	Daftar Isi	Lampirkan		03. Daftar Isi.pdf
4.	Salinan dokumen penetapan pejabat berwenang Kontrak KKS	Lampirkan		04. Penetapan Pejabat Berwenang.pdf
5.	Ringkasan rencana Tender (SC-03A)	Lampirkan		05. SC-03A.pdf
6.	Salinan Plan of	Lampirkan		06. Dasar Kegiatan.pdf



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 4 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

	<i>Development (POD)/ Plan Of Further Development (POFD)/ Put on Production (POP) dan/atau Work Program and Budget (WP&B) dan/atau rencana kerja/ kegiatan yang telah disetujui BPMA</i>	<i>Catatan: Apabila dasar rencana Tender tidak mengacu pada Plan Of Development (POD)/ Plan of Further Development (POFD)/ Put on Production (POP) dan/atau Work Program and Budget (WP&B), tetapi mengacu pada rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui BPMA, maka formatnya dapat berupa risalah rapat Pre WP&B, Risalah rapat Teknis/Anggaran, Project Summary, Program Summary atau yang sejenis</i>		
7.	Salinan persetujuan AFE (jika ada)	<i>Lampirkan</i>		07. AFE.pdf
8.	Salinan daftar pengadaan (<i>Procurement List</i>) yang Telah disetujui BPMA	<i>Lampirkan</i>		08. <i>Procurement List</i> .pdf
9.	Salinan persetujuan rencana kerja dan spesifikasi teknis barang/ jasa dari fungsi yang melaksanakan pengelolaan perencanaan dan/atau operasi BPMA	<i>Lampirkan Catatan: Dokumen yang dimaksud dapat berupa hasil pembahasan aspek teknis mengenai rencana kerja dan lingkup kerja kegiatan dengan fungsi yang melaksanakan pengelolaan perencanaan dan/atau operasi BPMA yang dituangkan dalam risalah rapat teknis atau yang sejenis</i>		09. Persetujuan Teknis.pdf
10.	Justifikasi atau penjelasan atas pemilihan metode Tender	<i>Lampirkan</i>		10. Justifikasi atau Penjelasan Tender.pdf
11.	Salinan dokumen penilaian Kualifikasi atau Prakuilifikasi (dalam hal dilakukan Prakuilifikas)	<i>Lampirkan</i>		11. Kualifikasi.pdf
12.	Salinan dokumen evaluasi teknis	<i>Lampirkan Catatan: Berisi penjelasan sekurang-kurangnya: • Kriteria dan tata cara evaluasi teknis • Kriteria kelulusan</i>		12. Evaluasi Teknis.pdf
13.	Salinan dokumen evaluasi komersial	<i>Lampirkan Catatan: Berisi penjelasan sekurang-kurangnya: • Kriteria dan tata cara evaluasi harga • Formulir penawaran harga</i>		13. Evaluasi Komersial.pdf
14.	Dokumen ringkasan draft Kontak	<i>Lampiran Catatan: Berisi penjelasan sekurang-kurangnya antara lain: a. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab kedua belah pihak b. Lingkup pekerjaan secara umum termasuk persyaratan dan spesifikasi teknis c. Harga dan nilai kontrak d. Ketentuan komitmen Penyedia Barang/Jasa dalam penggunaan produksi/kompeten dalam negeri e. Tanggal dimulainya dan jangka waktu Kontrak, dan/ atau tanggal dimulainya pekerjaan, dan/atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan, dan/atau tanggal penyerahan barang</i>		14. Ringkasan Draft Kontrak.pdf



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 5 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

		<p>f. Syarat-syarat Pembayaran</p> <ul style="list-style-type: none">• Jangka waktu Pembayaran• Jenis mata uang dalam pembayaran• Ketentuan pemberian uang muka• Ketentuan pembayaran kepada SubKontraktor <p>g. Persentase, masa berlaku, dan persyaratan jaminan pelaksanaan</p> <p>h. Ketentuan tentang Sanksi</p> <p>i. Ketentuan mengenai indicator penilaian kinerja/Key Performance Indicator (KPI) Pelaksana Kontrak, yang ditetapkan oleh KONTRAKTOR KKS rangka evaluasi Kinerja yang akan dilakukan secara periodic sesuai dengan jenis pekerjaan</p> <p>j. Ketentuan tentang asuransi dan perpajakan</p> <p>k. Ketentuan tentang impor Barang Operasi Perminyakan (BOP)</p> <p>l. Ketentuan apabila peserta Tender dengan nilai penawaran lebih rendah disbanding dengan 80% (delapan Puluh persen) dari HPS/OE ditunjuk sebagai pemenang</p> <p>m. Ketentuan tentang pemutusan dini Kontrak, antara lain disampaikan mengenai kondisi yang menyebabkan di[putusnya Kontrak, mekanisme pemberitahuan kepada Pelaksana Kontrak, mulai berlakunya pemutusan Kontrak, tindak Lanjut setelah pemutusan Kontrak, dll</p> <p>n. Ketentuan tentang tanggung jawab dan ganti rugi.</p> <p>o. Ketentuan tentang kerahasiaan.</p> <p>p. Ketentuan tentang keadaan Kahar (force majeure).</p> <p>q. Ketentuan tentang penyelesaian perselisihan.</p> <p>r. Ketentuan tentang amandemen (perubahan isi) Kontrak.</p> <p>s. Ketentuan pengalihan pekerjaan</p> <p>t. Bahasa Kontrak</p> <p>u. Apabila di dalam Kontrak terdapat lampiran (exhibit, appendix, attachment) maka harus dinyatakan bahwa lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kontrak</p> <p>v. Pelaksana Kontrak harus mematuhi ketentuan hukum dan peraturan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku serta bertanggung jawab atas setiap permasalahan hubungan industrial dengan karyawan Penyedia Barang/Jasa yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>w. Untuk kontrak jasa pengeboran (drilling) yang memasukkan ketentuan mengenai penggantian biaya-biaya di luar ruang lingkup pekerjaan atau biaya-biaya penggantian barang yang hilang, termasuk Lost In Hole, maka kriteria penggantian serta nilainya harus dinyatakan secara jelas dalam Kontrak.</p> <p>x. Ketentuan tentang anti-suap dan korupsi (anti-bribery & corruption) sesuai dengan hukum mengenai anti-suap dan korupsi yang berlaku di Republik Indonesia dan hukum lain</p>		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 6 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

No	Dokumen	yang berlaku di lingkungan KONTRAKTOR KKS tersebut (jika diberlakukan) sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Republik Indonesia.	Status (Ada/Tidak Ada/Tidak Perlu)	Nama File Lampiran (dalam format pdf)
		yang berlaku di lingkungan KONTRAKTOR KKS tersebut (jika diberlakukan) sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Republik Indonesia.		
		y. Ketentuan mengenai hak KONTRAKTOR KKS dan SKK Migas atau auditor independen yang ditunjuk oleh KONTRAKTOR KKS dan/atau SKK Migas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Kontrak termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption (ABC) kepada perusahaan Pelaksana Kontrak. Pelaksana Kontrak harus menyampaikan data hard copy dan data digital kepada auditor independen yang ditunjuk oleh KONTRAKTOR KKS dan/atau BPMA. KONTRAKTOR KKS dan/atau BPMA berkewajiban memberitahukan auditor dan/atau PPKD tentang yang ditunjuk kepada Pelaksana Kontrak.		
1.	SC-02	Lampiran	d	e
2.	Surat pengantar asli yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang KONTRAKTOR KKS dan BPMA.	Lampiran dan/atau BPMA. KONTRAKTOR KKS dan/atau BPMA berkewajiban memberitahukan auditor dan/atau PPKD tentang yang ditunjuk kepada Pelaksana Kontrak.		02. Surat Pengantar. pdf
15.	Dokumen penjelasan dasar-dasar penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) /Owner Estimate (OE)	Lampiran dan/atau BPMA. KONTRAKTOR KKS dan/atau BPMA berkewajiban memberitahukan auditor dan/atau PPKD tentang yang ditunjuk kepada Pelaksana Kontrak.		15. HPS.pdf
16.	Dokumen terkait kewajiban penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri	Lampiran dan/atau BPMA. KONTRAKTOR KKS dan/atau BPMA berkewajiban memberitahukan auditor dan/atau PPKD tentang yang ditunjuk kepada Pelaksana Kontrak.		16. Pemanfaatan spesifikasi nasional.pdf
17.	Dokumen perjanjian pengadaan bersama	Lampiran dan/atau BPMA. KONTRAKTOR KKS dan/atau BPMA berkewajiban memberitahukan auditor dan/atau PPKD tentang yang ditunjuk kepada Pelaksana Kontrak.		17. Perjanjian pengadaan bersama.pdf
18.	Konsep pengumuman Tender	Lampiran dan/atau BPMA. KONTRAKTOR KKS dan/atau BPMA berkewajiban memberitahukan auditor dan/atau PPKD tentang yang ditunjuk kepada Pelaksana Kontrak.		18. Pengumuman.pdf
19.	Dokumen rencana tata waktu proses Tender mulai dari pengumuman/ undangan Tender sampai dengan penandatanganan Kontrak	Lampiran dan/atau BPMA. KONTRAKTOR KKS dan/atau BPMA berkewajiban memberitahukan auditor dan/atau PPKD tentang yang ditunjuk kepada Pelaksana Kontrak.		19. Tata Waktu.pdf
20.	Salinan surat keputusan Pejabat yang Berwenang di Kantor BPMA	Lampiran dan/atau BPMA. KONTRAKTOR KKS dan/atau BPMA berkewajiban memberitahukan auditor dan/atau PPKD tentang yang ditunjuk kepada Pelaksana Kontrak.		20. Panitia Tender.pdf
3.	Daftar Isi	Lampiran dan/atau BPMA. KONTRAKTOR KKS dan/atau BPMA berkewajiban memberitahukan auditor dan/atau PPKD tentang yang ditunjuk kepada Pelaksana Kontrak.		03. Daftar Isi.pdf
4.	Salinan dokumen Berwenang di Kantor BPMA	Lampiran dan/atau BPMA. KONTRAKTOR KKS dan/atau BPMA berkewajiban memberitahukan auditor dan/atau PPKD tentang yang ditunjuk kepada Pelaksana Kontrak.		04. Penetapan Pejabat Berwenang.pdf
5.	Surat Sasaran Panitia Tender (SC-03A)	Lampiran dan/atau BPMA. KONTRAKTOR KKS dan/atau BPMA berkewajiban memberitahukan auditor dan/atau PPKD tentang yang ditunjuk kepada Pelaksana Kontrak.		05. SC-03A.pdf
6.	Salinan Plan of Development (POD)/ Plan Of Further Development (POFD)/	Lampiran dan/atau BPMA. KONTRAKTOR KKS dan/atau BPMA berkewajiban memberitahukan auditor dan/atau PPKD tentang yang ditunjuk kepada Pelaksana Kontrak.		06. Dasar Kegiatan.pdf



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 7 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

	<i>Put on Production (POP)/ dan/atau Work Program and Budget (WP&B) dan/atau rencana kerja/ kegiatan yang telah disetujui BPMA</i>	<i>Development (POFD)/ Put on Production (POP) dan/atau Work Program and Budget (WP&B), tetapi mengacu pada rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui BPMA, maka formatnya dapat berupa risalah rapat Pre WP&B, Risalah rapat Teknis/Anggaran, Project Summary, Program Summary atau yang sejenis</i>		
7.	Salinan persetujuan AFE (jika ada)	<i>Lampirkan</i>		07. AFE.pdf
8.	Salinan daftar pengadaan (<i>Procurement List</i>) yang Telah disetujui BPMA	<i>Lampirkan</i>		08. <i>Procurement List</i> .pdf
9.	Salinan persetujuan rencana kerja dan spesifikasi teknis barang/ jasa dari fungsi yang melaksanakan pengelolaan perencanaan dan/atau operasi BPMA	<i>Lampirkan</i> <i>Catatan:</i> <i>Dokumen yang dimaksud dapat berupa hasil pembahasan aspek teknis mengenai rencana kerja dan lingkup kerja kegiatan dengan fungsi yang melaksanakan pengelolaan perencanaan dan/atau operasi BPMA yang dituangkan dalam risalah rapat teknis atau yang sejenis</i>		09. Persetujuan Teknis.pdf
10.	Justifikasi atau penjelasan atas pemilihan metode Tender	<i>Lampirkan</i>		10. Justifikasi atau Penjelasan Tender.pdf
11.	Salinan dokumen penilaian Kualifikasi atau Prakuualifikasi (dalam hal dilakukan Prakuualifikas)	<i>Lampirkan</i>		11. Kualifikasi.pdf
12.	Salinan dokumen evaluasi teknis	<i>Lampirkan</i> <i>Catatan:</i> <i>Berisi penjelasan sekurang-kurangnya:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Kriteria dan tata cara evaluasi teknis</i>• <i>Kriteria kelulusan</i>		12. Evaluasi Teknis.pdf
13.	Salinan dokumen evaluasi komersial	<i>Lampirkan</i> <i>Catatan:</i> <i>Berisi penjelasan sekurang-kurangnya:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Kriteria dan tata cara evaluasi harga</i>• <i>Formulir penawaran harga</i>		13. Evaluasi Komersial.pdf
14.	Dokumen ringkasan draft Kontak	<i>Lampiran</i> <i>Catatan:</i> <i>Berisi penjelasan sekurang-kurangnya antara lain:</i> <ol style="list-style-type: none">a. <i>Hak, kewajiban, dan tanggung jawab kedua belah pihak</i>b. <i>Lingkup pekerjaan secara umum termasuk persyaratan dan spesifikasi teknis</i>c. <i>Harga dan nilai kontrak</i>d. <i>Ketentuan komitmen Penyedia Barang/Jasa dalam penggunaan produksi/kompeten dalam negeri</i>e. <i>Tanggal dimulainya dan jangka waktu Kontrak, dan/ atau tanggal dimulainya pekerjaan, dan/atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan, dan/atau tanggal penyerahan barang</i>f. <i>Syarat-syarat Pembayaran</i><ul style="list-style-type: none">• <i>Jangka waktu Pembayaran</i>• <i>Jenis mata uang dalam pembayaran</i>		14. Ringkasan Draft Kontrak.pdf



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 8 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- *Ketentuan pemberian uang muka*
- *Ketentuan pembayaran kepada SubKontraktor*
- g. *Persentase, masa berlaku, dan persyaratan jaminan pelaksanaan*
- h. *Ketentuan tentang Sanksi*
- i. *Ketentuan mengenai indicator penilaian kinerja/Key Performance Indicator (KPI) Pelaksana Kontrak, yang ditetapkan oleh KONTRAKTOR KKS rangka evaluasi Kinerja yang akan dilakukan secara periodic sesuai dengan jenis pekerjaan*
- j. *Ketentuan tentang asuransi dan perpajakan*
- k. *Ketentuan tentang impor Barang Operasi Perminyakan (BOP)*
- l. *Ketentuan apabila peserta Tender dengan nilai penawaran lebih rendah disbanding dengan 80% (delapan Puluh persen) dari HPS/OE ditunjuk sebagai pemenang*
- m. *Ketentuan tentang pemutusan dini Kontrak, antara lain disampaikan mengenai kondisi yang menyebabkan diputusnya Kontrak, mekanisme pemberitahuan kepada Pelaksana Kontrak, mulai berlakunya pemutusan Kontrak, tindak Lanjut setelah pemutusan Kontrak, dll*
- n. *Ketentuan tentang tanggung jawab dan ganti rugi.*
- o. *Ketentuan tentang kerahasiaan.*
- p. *Ketentuan tentang keadaan Kahar (force majeure).*
- q. *Ketentuan tentang penyelesaian perselisihan.*
- r. *Ketentuan tentang amandemen (perubahan isi) Kontrak.*
- s. *Ketentuan pengalihan pekerjaan*
- t. *Bahasa Kontrak*
- u. *Apabila di dalam Kontrak terdapat lampiran (exhibit, appendix, attachment) maka harus dinyatakan bahwa lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kontrak*
- v. *Pelaksana Kontrak harus mematuhi ketentuan hukum dan peraturan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku serta bertanggung jawab atas setiap permasalahan hubungan industrial dengan karyawan Penyedia Barang/Jasa yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.*
- w. *Untuk kontrak jasa pengeboran (drilling) yang memasukkan ketentuan mengenai penggantian biaya-biaya di luar ruang lingkup pekerjaan atau biaya-biaya penggantian barang yang hilang, termasuk Lost In Hole, maka kriteria penggantian serta nilainya harus dinyatakan secara jelas dalam Kontrak.*
- x. *Ketentuan tentang anti-suap dan korupsi (anti-bribery & corruption) sesuai dengan hukum mengenai anti-suap dan korupsi yang berlaku di Republik Indonesia dan hukum lain yang berlaku di lingkungan KONTRAKTOR KKS tersebut (jika diberlakukan) sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Republik Indonesia.*

		y. <i>Ketentuan mengenai hak KONTRAKTOR KKS dan SKK Migas atau auditor independen yang ditunjuk oleh KONTRAKTOR KKS dan/ atau SKK Migas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Kontrak termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption (ABC) kepada perusahaan Pelaksana Kontrak. Pelaksana Kontrak harus menyampaikan data hard copy dan data digital kepada auditor independen yang ditunjuk oleh KONTRAKTOR KKS dan/atau BPMA. KONTRAKTOR KKS dan/atau BPMA memberitahukan auditor independen yang ditunjuk kepada Pelaksana Kontrak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara current dan post audit.</i>		
15.	Dokumen penjelasan dasar-dasar penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) /Owner Estimate (OE)	<i>Lampirkan</i> <i>Catatan:</i> <i>Berisi penjelasan mekanisme dan dasar-dasar penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) /Owner Estimate (OE).</i>		15. HPS.pdf
16.	Dokumen terkait kewajiban penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri	<i>Lampirkan</i> <i>a. Dokumen daftar pabrikan (manufacturers list) berdasarkan buku APDN (apabila ada)</i> <i>b. Dokumen dasar penetapan batasan minimal TKDN</i> <i>Catatan:</i> <i>Daftar barang/jasa yang belum menggunakan SNI/ SKKNI atau belum dapat menggunakan spesifikasi dalam Buku APDN beserta justifikasinya.</i>		16. Pemanfaatan spesifikasi nasional.pdf
17.	Dokumen perjanjian pengadaan bersama	<i>Salinan perjanjian kerja sama antar KONTRAKTOR KKS yang memuat antara lain peran, hak dan kewajiban para pihak serta KONTRAKTOR KKS yang ditunjuk sebagai koordinator, dalam hal dilakukan pengadaan bersama</i>		17. Perjanjian pengadaan bersama.pdf
18.	Konsep pengumuman Tender	<i>Lampirkan</i>		18. Pengumuman.pdf
19.	Dokumen rencana tata waktu proses Tender mulai dari pengumuman/ undangan Tender sampai dengan penandatanganan Kontrak	<i>Lampirkan</i>		19. Tata Waktu.pdf
20.	Salinan surat keputusan Pejabat yang Berwenang di KONTRAKTOR KKS tentang susunan Panitia Tender, dan salinan sertifikat PTK007 Panitia Tender	<i>Lampirkan</i>		20. Panitia Tender.pdf

Keterangan:

1. Setiap pengajuan rencana Tender harus menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Lampiran 3 dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* secara lengkap dan benar.
2. Dokumen rencana Tender dalam bentuk *hardcopy* harus disampaikan dalam binder warna hijau, diberi pembatas



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 10 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- dan nama seperti pada kolom 'e' untuk setiap jenis dokumen.
3. Dokumen rencana Tender dalam bentuk *softcopy* harus disampaikan dalam dalam CD-R atau DVD-R, diberi identitas nama KONTRAKTOR KKS, Judul Tender dan No. Tender. Format file dibuat dalam bentuk PDF hasil scan dokumen aslinya, dan masing-masing jenis dokumen dibuat dalam file terpisah dengan nama seperti pada kolom 'e'.
 4. Kolom 'd' diisi oleh petugas loket Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa BPMA.
 5. No. Daftar Pengadaan (NDP) nomor yang diperoleh dari sistem informasi pengelolaan rantai suplai BPMA.
 6. No. Rencana Tender (NRT) nomor yang diperoleh dari sistem pengelolaan rantai suplai BPMA.

Disiapkan oleh: [Nama KONTRAKTOR KKS]	Diperiksa Oleh: Petugas Loket
Tandatangan	Tandatangan
Nama Lengkap: Tanggal:	Nama Lengkap: Tanggal:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 11 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

**LAMPIRAN 4
SC-03A RINGKASAN RENCANA TENDER**

Nama KONTRAKTOR KKS	
Wilayah Kerja/ Lapangan	
Status KONTRAKTOR KKS	Eksplorasi / Eksploitasi(*)
Nama Pimpinan Tertinggi KONTRAKTOR KKS	
Nama Pejabat Berwenang KONTRAKTOR KKS	
Nama Ketua Panitia Tender	
No. Tender	
Judul Tender	
No. Surat Persetujuan Rencana Tender	Dikosongkan

(*) pilih salah satu

No	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender
1.	Metode Pelaksanaan Tender	<i>Pilih salah satu:</i> - Pelelangan Umum - Pemilihan Langsung - Penunjukan Langsung
2.	Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	<i>Pilih salah satu:</i> - Sistem Satu Sampul - Sistem Dua Sampul - Sistem Dua Tahap
3.	Kategori Tender Barang (<i>khusus untuk Tender Barang</i>)	<i>Pilih salah satu:</i> - wajib - non-wajib - non-APDN
4.	Justifikasi atau penjelasan pemilihan metode Tender	<i>Diisi dengan penjelasan: Metode Tender menggunakan.....dengan justifikasi/penjelasan sebagai berikut:..... Pemilihan metode tersebut sesuai dengan ketentuan PTK007 Buku Kedua Revisi 04Bab.....angka..... yaitu.....</i>



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 12 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

5.	Penjelasan Singkat Mekanisme Penyusunan Paket Tender	<p><i>Diisi dengan penjelasan sbb: Disusun dalam (jumlah) Paket/sub-Paket Tender dengan dasar penggabungan/pemisahan Paket/sub-Paket berdasarkan.....</i></p> <p><i>Dalam hal dibuat lebih dari satu Paket/sub-Paket, dijelaskan mengenai keterkaitan satu Paket/subPaket dengan Paket/sub-Paket lainnya termasuk mekanisme/tahapan penetapan pemenang dan cara pengajuan hasil pelaksanaan Tender kepada BPMA sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Bertahap Dilakukan berdasarkan urutan besaran nilai Paket/sub-Paket Tender, kebutuhan operasional, tingkat risiko pekerjaan; atau</i><i>2. Bersamaan Dilakukan bersamaan untuk seluruh Paket/sub-Paket Tender;</i>
6.	Latar Belakang Pengadaan Barang/ Jasa	<p><i>Diisi dengan penjelasan latar belakang, maksud dan tujuan diperlukannya pengadaan ini. Diinformasikan Kontrak sejenis sebelumnya atau yang sedang berjalan.</i></p>
7.	Gambaran Umum Lingkup Kerja	<p><i>Diisi dengan penjelasan gambaran umum Lingkup Kerja.</i></p>
8.	Bidang Usaha	<p><i>Diisi mengacu pada klasifikasi Bidang Usaha yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi, dalam hal tidak diatur maka mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.</i></p>
9.	Subbidang Usaha	<p><i>Diisi mengacu pada klasifikasi Subbidang Usaha yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi, dalam hal tidak diatur maka mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.</i></p>
10.	Jenis Komoditas Barang/Jasa	<p><i>Diisi mengacu pada jenis komoditas pada peta jalur target capaian TKDN yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi.</i></p>
11.	Target Capaian TKDN	<p><i>Diisi dengan besaran persentase mengacu pada target TKDN pada peta jalur target capaian TKDN yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi.</i></p>
12.	Batasan Minimal TKDN	<p><i>Diisi dengan batasan persentase TKDN yang akan dipersyaratkan, termasuk batasan nilai porsi pelaksana pekerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan/atau</i></p>

		<i>Perusahaan Asing, dan/atau porsi pelaksanaan pekerjaan di wilayah negara Republik Indonesia, serta kewajiban penyedia jasa untuk bekerjasama dengan usaha kecil termasuk koperasi kecil dan/atau usaha menengah setempat.</i>
13.	Referensi persetujuan lingkup kerja dan spesifikasi teknis dan/atau risalah rapat, dan perubahannya dari fungsi terkait SKK Migas	<i>Diisi tanggal, judul Persetujuan/Pembahasan, dan/atau nomor persetujuan jika ada</i>
14.	Dasar Rencana Kerja dan Anggaran	
	<i>Plan Of Development (POD), dan POD Revisi (jika ada)</i>	<i>Nomor: Tanggal:</i>
	<i>Work Program and Budget (WP&B), dan WP&B Revisi (jika ada)</i>	<i>Nomor: Tahun: No. BS: Line: Nilai:</i>
	<i>Authorization for Expenditure (AFE)</i>	<i>Nomor: Tanggal: Line: Nilai:</i>
15.	Persetujuan Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>)	<i>Tahun: No. Proclis: No. Daftar Pengadaan: Nilai:</i>
16.	Persyaratan kualifikasi khusus	<i>Diisi dengan persyaratan khusus dalam penilaian kualifikasi, antara lain batasan nilai Npt, sertifikasi, pengalaman khusus, dll.</i>
17.	Mekanisme evaluasi teknis	<i>Diisi dengan penjelasan umum metode penilaian evaluasi teknis.</i>
18.	Mekanisme evaluasi komersial	<i>Diisi dengan penjelasan umum metode evaluasi komersial.</i>
19.	Jenis Kontrak Berdasarkan Cara Pembayaran	<i>Diisi dengan keterangan sbb: - Lumpsum - Turn key - Persentase - Harga Satuan - Cost Plus Fee; dan/atau - Incentive Contract Dan penjelasan skema pembayaran, keterkaitan pembayaran dengan kinerja.</i>
20.	Jenis Kontrak Berdasarkan Bentuk Perikatan	<i>Diisi dengan keterangan sbb: - Kontrak Bersama</i>



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 14 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

		<ul style="list-style-type: none">- <i>Strategic Alliance</i>- <i>Call Off Order</i>- <i>Consignment</i>- <i>Price Agreement</i>- <i>Multi Standing Agreement</i>- <i>Technical Framework Contract;</i>- <i>Kontrak jasa; dan/atau</i>- <i>Lainnya</i>
21.	Jangka waktu Kontrak	<i>Diisi dengan periode Kontrak serta estimasi tanggal mulai dan berakhir Kontrak.</i>

Demikian ringkasan rencana Tender ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

.....[tempat].....,[tanggal].....

.....[nama KONTRAKTOR KKS].....

Ttd.

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang KONTRAKTOR KKS].....



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 15 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

**LAMPIRAN 5
SC-03B RINGKASAN HASIL PELAKSANAAN TENDER**

Bagian Kesatu

PENJELASAN UMUM

Nama KONTRAKTOR KKS	
Wilayah Kerja/ Lapangan	
Status KONTRAKTOR KKS	Eksplorasi / Eksploitasi(*)
Nama Pimpinan Tertinggi KONTRAKTOR KKS	
Nama Pejabat Berwenang KONTRAKTOR KKS	
Nama Ketua Panitia Tender	
No. Tender	
Judul Tender	
No. Surat Persetujuan Rencana Tender	

(*) pilih salah satu

No	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender (Diisi sesuai dengan SC-03A yang telah dibuat pada saat rencana Tender)	Hasil Pelaksanaan Tender
1.	Metode Pelaksanaan Tender		Pilih salah satu: - Pelelangan Umum - Pemilihan Langsung - Penunjukan Langsung
2.	Metode Penyampaian Dokumen Penawaran		Pilih salah satu: - Sistem Satu Sampul - Sistem Dua Sampul - Sistem Dua Tahap
3.	Kategori Tender Barang (khusus untuk Tender Barang)		Pilih salah satu: - wajib - non-wajib - non-APDN
4.	Justifikasi atau penjelasan pemilihan metode Tender		Diisi dengan penjelasan: Metode Tender menggunakan.....dengan justifikasi sebagai berikut:..... Pemilihan metode tersebut sesuai dengan ketentuan PTK007 Buku Kedua Revisi 04Bab.....angka..... yaitu.....



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 16 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

No	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender (Diisi sesuai dengan SC-03A yang telah dibuat pada saat rencana Tender)	Hasil Pelaksanaan Tender
5.	Penjelasan Singkat Mekanisme Penyusunan Paket Tender		<p>Diisi dengan penjelasan sbb: Disusun dalam (jumlah) Paket/sub-Paket Tender dengan dasar penggabungan/pemisahan Paket/sub-Paket berdasarkan.....</p> <p>Dalam hal dibuat lebih dari satu Paket/sub-Paket, dijelaskan mengenai keterkaitan satu Paket/sub-Paket dengan Paket/sub-Paket lainnya termasuk mekanisme/tahapan penetapan pemenang dan cara pengajuan hasil pelaksanaan Tender kepada BPMA sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bertahap Dilakukan berdasarkan urutan besaran nilai Paket/sub-Paket Tender, kebutuhan operasional, tingkat risiko pekerjaan; atau2. Bersamaan Dilakukan bersamaan untuk seluruh Paket/sub-Paket Tender;
6.	Latar Belakang Pengadaan Barang/Jasa		<p>Diisi dengan penjelasan latar belakang, maksud dan tujuan diperlukannya pengadaan ini. Diinformasikan Kontrak sejenis sebelumnya atau yang sedang berjalan.</p>



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 17 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

No	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender (Diisi sesuai dengan SC-03A yang telah dibuat pada saat rencana Tender)	Hasil Pelaksanaan Tender
7.	Gambaran Umum Lingkup Kerja		<i>Diisi dengan penjelasan gambaran umum Lingkup Kerja.</i>
8.	Bidang Usaha		<i>Diisi mengacu pada klasifikasi Bidang Usaha yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi, dalam hal tidak diatur maka mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.</i>
9.	Subbidang Usaha		<i>Diisi mengacu pada klasifikasi Subbidang Usaha yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi, dalam hal tidak diatur maka mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.</i>
10.	Jenis Komoditas Barang/Jasa		<i>Diisi mengacu pada jenis komoditas pada peta jalur target capaian TKDN yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi.</i>
11.	Target Capaian TKDN		<i>Diisi dengan besaran persentase mengacu pada target TKDN pada peta jalur target capaian TKDN yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi.</i>



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 18 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

No	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender <i>(Diisi sesuai dengan SC-03A yang telah dibuat pada saat rencana Tender)</i>	Hasil Pelaksanaan Tender
12.	Batasan Minimal TKDN		<i>Diisi dengan batasan persentase TKDN yang akan dipersyaratkan, termasuk batasan nilai porsi pelaksanaan pekerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan/atau Perusahaan Asing, dan/atau porsi pelaksanaan pekerjaan di wilayah negara Republik Indonesia, serta kewajiban penyedia jasa untuk bekerjasama dengan usaha kecil termasuk koperasi kecil dan/atau usaha menengah setempat.</i>
13.	Referensi persetujuan lingkup kerja dan spesifikasi teknis dan/ atau risalah rapat, dan perubahannya dari fungsi terkait BPMA		<i>Diisi tanggal, judul Persetujuan/Pembahasan, dan/atau nomor persetujuan ada</i>
14.	Dasar Rencana Kerja dan Anggaran		
	<i>Plan Of Development (POD), dan POD Revisi (jika ada)</i>		<i>Nomor: Tanggal:</i>
	<i>Work Program and Budget (WP&B), dan WP&B Revisi (jika ada)</i>		<i>Nomor: Tahun: No. BS: Line: Nilai:</i>
	<i>Authorization for Expenditure (AFE)</i>		<i>Nomor: Tanggal: Line: Nilai:</i>
15.	Persetujuan Daftar Pengadaan <i>(Procurement List)</i>		<i>Tahun: No. Proclis: No. Daftar Pengadaan: Nilai:</i>



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 19 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

No	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender (Diisi sesuai dengan SC-03A yang telah dibuat pada saat rencana Tender)	Hasil Pelaksanaan Tender
16.	Persyaratan kualifikasi khusus		<i>Diisi dengan persyaratan khusus dalam penilaian kualifikasi, antara lain batasan nilai Npt, sertifikasi, pengalaman khusus, dll.</i>
17.	Mekanisme evaluasi teknis		<i>Diisi dengan penjelasan umum metode penilaian evaluasi teknis.</i>
18.	Mekanisme evaluasi komersial		<i>Diisi dengan penjelasan umum metode evaluasi komersial.</i>
19.	No. Surat Persetujuan Rencana Tender BPMA	<i>Dikosongkan</i>	<i>Diisi dengan no surat persetujuan rencana Tender dari BPMA</i>
20.	Harga Perkiraan Sendiri/ <i>Owner Estimate</i> (HPS/OE) Awal	<i>Dikosongkan</i>	<i>Diisi dengan HPS/OE</i>
21.	Harga Perkiraan Sendiri/ <i>Owner Estimate</i> (HPS/OE) Revisi (Apabila ada)	<i>Dikosongkan</i>	<i>Diisi dengan HPS/OE revisi (apabila ada)</i>
22.	Jenis Kontrak Berdasarkan Cara Pembayaran		<i>Diisi dengan keterangan sbb: - Lumpsum - Turn key - Persentase - Harga Satuan - Cost Plus Fee; dan/atau - Incentive Contract - Dan penjelasan skema pembayaran, keterkaitan pembayaran dengan kinerja.</i>
23.	Jenis Kontrak Berdasarkan Bentuk Perikatan		<i>Diisi dengan keterangan sbb: - Kontrak Bersama - Strategic Alliance - Call Off Order - Consignment - Price Agreement - Multi Standing Agreement</i>



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 20 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

No	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender (Diisi sesuai dengan SC-03A yang telah dibuat pada saat rencana Tender)	Hasil Pelaksanaan Tender
			- <i>Technical Framework Contract;</i> - <i>Kontrak jasa; dan/atau</i> - <i>Lainnya</i>
24.	Jangka waktu Kontrak		<i>Diisi dengan periode Kontrak serta estimasi tanggal mulai dan berakhir Kontrak.</i>



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 21 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

Bagian Kedua

**KRONOLOGIS PELAKSANAAN TENDER
TENDER AWAL / TENDER ULANG(*)**

(*) pilih salah satu

1. Pengumuman dan Pendaftaran:

Tanggal pengumuman dan/atau undangan :

Diumumkan di papan pengumuman resmi KONTRAKTOR KKS : Ya / Tidak (*)

Diumumkan di media cetak : Ya / Tidak (*) Nama media cetak:.....

Diumumkan di *website* : Ya / Tidak (*) Alamat URL:.....

Diumumkan di CIVD : Ya / Tidak (*)

Periode pendaftaran : Tanggal s.d.....

No	Pendaftar	Perusahaan yang diundang pada Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung (Ya/Tidak)	Tanggal Mendaftar	Memenuhi Syarat (Ya/Tidak)	Keterangan Apabila Tidak Memenuhi Syarat

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

(*) pilih salah satu

2. Penilaian Kualifikasi (dalam hal dilakukan pelelangan umum)

Periode Pengambilan Dokumen Kualifikasi : Tanggal s.d.....

Tanggal Batas Akhir Penyampaian Dokumen Kualifikasi :

No	Nama Calon Peserta Tender	Status Perusahaan	Tanggal Pengambilan Dokumen Kualifikasi	Tanggal Penyampaian Dokumen Kualifikasi	Hasil Penilaian Kualifikasi (Lulus/ Tidak Lulus)	Keterangan Tidak Lulus

Jumlah Calon Peserta Tender yang Mengambil Dokumen Kualifikasi :

Jumlah Calon Peserta Tender yang Menyampaikan Dokumen Kualifikasi :

Jumlah Calon Peserta Tender yang Lulus :

Keterangan Kuorum : Ya / Tidak (*)

Tanggal Berita Acara Penilaian Kualifikasi :

Tanggal Pengumuman Hasil Penilaian Kualifikasi :



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 22 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

Keterangan jika ada keberatan dari Calon Peserta Tender dan penyelesaiannya (jika ada):

No	Nama Calon Peserta Tender	Surat Keberatan		Surat dan/atau Rapat Tanggapan	
		Tanggal	Materi	Tanggal	Materi

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

(*) pilih salah satu

3. Evaluasi Penawaran Teknis

Periode Pengambilan Dokumen Tender : Tanggals.d.....
 Tanggal Pemberian Penjelasan :
 Tanggal Peninjauan Lapangan :
 Tanggal Batas Akhir Penyampaian Penawaran Teknis :
 Tanggal Pembukaan Penawaran Teknis :

No	Nama Peserta Tender	Tanggal Pengambilan Dokumen Tender	Pemberian Penjelasan (Hadir/Tidak)	Peninjauan Lapangan (Hadir/Tidak)	Tanggal Penyampaian Dokumen Penawaran	Pembukaan Penawaran (Lengkap/Tidak)	Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran (Lulus/Tidak Lulus)	Keterangan untuk peserta yang tidak mengambil Dokumen Tender (jika ada)

Jumlah Peserta Tender yang Mengambil Dokumen Tender :
 Jumlah Peserta Tender yang Hadir dalam Pemberian Penjelasan :
 Jumlah Peserta Tender yang Hadir dalam Peninjauan Lapangan :
 Jumlah Peserta Tender yang Menyampaikan Penawaran Teknis :
 Jumlah Penawaran Dinyatakan Lengkap pada saat Pembukaan :
 Jumlah Peserta Tender yang Lulus :
 Keterangan Kuorum : Ya / Tidak (*)
 Tanggal Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis :
 Tanggal Pengumuman Hasil Evaluasi Teknis :

Protes/Sanggahan Pertama (jika ada):

No	Nama Peserta Tender	Surat Sanggahan		Surat dan/atau Rapat Tanggapan	
		Tanggal	Materi	Tanggal	Materi



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 23 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

Sanggahan Ulang (jika ada):

No	Nama Peserta Tender	Surat Sanggahan		Surat dan/atau Rapat Tanggapan	
		Tanggal	Materi	Tanggal	Materi

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

(*) pilih salah satu

4. Evaluasi Penawaran Komersial

Tanggal Batas Akhir Penyampaian Dokumen Tahap-II :

(diisi khusus pada Sistem Dua Tahap)

Tanggal Pembukaan Dokumen Penawaran :

Batasan Minimal TKDN yang dipersyaratkan :

HPS/OE :

4.1. Evaluasi Dokumen Penawaran:

No	Nama Peserta Tender	Status Perusahaan	Penawaran			Jaminan Penawaran				Hasil Evaluasi Penawaran (Lulus / Tidak Lulus)	Ket. Apabila Tidak Lulus
			Nilai (US\$/Rp)	TKDN	Tanggal Akhir Masa Berlaku Penawaran (s.d.)	Nilai (US\$/Rp)	Persentase Dari Harga Penawaran (%)	Tanggal Masa Berlaku (...s.d....)	Bank Penerbit		

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

4.2. Evaluasi HEP (Harga Evaluasi Penawaran)

No	Nama Peserta Tender	Nilai (US\$/Rp)*	Nilai Penawaran Setelah Koreksi Aritmetika (Jika ada)	HE TKDN	Psp (%)	Komponen Non Biaya (KNB)	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Nilai Normalisasi (Jika Ada)	HEP + Normalisasi	Peringkat Peserta Tender

Keterangan jika ada nilai normalisasi (jika diperlukan):



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 24 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

4.3. Negosiasi Penawaran:

No	Nama Peserta Tender	Harga Sebelum Negosiasi (US\$/Rp)	Negosiasi Bertahap			Negosiasi Bersamaan			Urutan Calon Pemenang
			Tanggal Negosiasi	Harga Setelah Negosiasi	Persentase Harga Penawaran Terhadap HPS/OE	Tanggal Negosiasi	Harga Setelah Negosiasi	Persentase Harga Penawaran Terhadap HPS/OE	

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

4.4. Revisi HPS/OE (jika dilakukan):

Nilai HPS/OE Awal :
Nilai HPS/OE Revisi :
Tanggal HPS/OE Revisi :
Justifikasi HPS/OE Revisi :

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

4.5. Hasil Pelaksanaan Tender:

Proses Tender yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dalam PTK007 Buku Kedua Revisi 04 dengan calon pemenang Tender sebagai berikut:

- a. Nama Calon Pemenang :
- b. Status Perusahaan :
- c. Status Perusahaan Berdasarkan APDN Jasa :
(khusus Tender jasa)
- d. NPWP :
- e. Nilai Kontrak :
- f. Persentase dari HPS/OE awal atau HPS/OE Revisi :
- g. Nilai HPS/OE Awal :
- h. Nilai HPS/OE Revisi (Jika ada) :
- i. Jangka Waktu Kontrak :
- j. Komitmen TKDN % :
- k. Tanggal Pengumuman Calon Pemenang :



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 25 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

Sanggahan Pertama (jika ada):

No	Nama Peserta Tender	Surat Sanggahan		Surat dan/atau Rapat Tanggapan	
		Tanggal	Materi	Tanggal	Materi

Sanggahan Ulang (jika ada):

No	Nama Peserta Tender	Surat Sanggahan		Surat dan/atau Rapat Tanggapan	
		Tanggal	Materi	Tanggal	Materi

Sanggahan Banding (jika ada):

No	Nama Peserta Tender	Surat Sanggahan			Surat (termasuk Rapat Tanggapan apabila ada)	
		Tanggal	Materi	Nilai Jaminan	Tanggal	Materi

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

Demikian hasil pelaksanaan Tender ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

.....[tempat].....,[tanggal].....

Yang menyatakan,

Ttd.

.....[nama lengkap].....

Ketua Panitia Tender

Yang menyetujui,

Ttd.

.....[nama lengkap].....

[jabatan Pejabat Berwenang KONTRAKTOR KKS].....

Keterangan:

Kronologis Pelaksanaan Tender untuk Tender Awal dan jika ada Tender Ulang dibuat secara terpisah menggunakan Bagian Kedua saja.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 26 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

LAMPIRAN 6

SC-04 CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN TENDER

Nama KONTRAKTOR KKS				
No. Tender				
Judul Tender				
No. Daftar Pengadaan (NDP)				
No. Rencana Tender (NRT)				
No. Hasil Tender (NHT)				
No	Dokumen	Penjelasan Singkat	Status (Ada / Tidak Ada/ Tidak Perlu)	Nama File Lampiran (dalam format pdf)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
1.	SC-04	<i>Lampirkan</i>		01. SC-04.pdf
2.	Surat Pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi KONTRAKTOR KKS	<i>Lampirkan Tuliskan informasi berikut disini: a. Nomor surat: b. Tanggal surat: c. No. Tender: d. Judul Tender: e. Dasar rencana Tender dan Anggaran: f. Penjelasan singkat lingkup kerja g. Bidang pekerjaan: Tender Barang/ Jasa Lainnya/Jasa Pemborongan/ Jasa Konsultansi → pilih salah satu h. Metode pelaksanaan Tender: Pelelangan Umum/ Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung → pilih salah satu i. Tata cara penyampaian dokumen penawaran: Sistem Satu Sampul/ Sistem Dua Sampul/ Sistem Dua Tahap → pilih salah satu j. Masa berlaku kontrak: k. Calon Pemenang: l. Nilai Hasil Tender: m. Komitmen TKDN: n. Narahubung (contact person): sebutkan nama, email, nomor telepon/HP Catatan: Surat pengantar berisi sekurang-kurangnya informasi diatas</i>		02. Surat Pengantar.pdf
3.	Daftar Isi	<i>Lampirkan</i>		03. Daftar Isi.pdf



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 27 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

4.	Ringkasan Hasil Pelaksanaan Tender yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi KONTRAKTOR KKS (SC03B)	<i>Lampirkan</i>		04. SC—03B.pdf
5.	Salinan persetujuan rencana Tender dan perubahannya (apabila ada)	<i>Lampirkan</i>		05. Persetujuan Rencana Tender.pdf
6.	Salinan SC-03A	<i>Lampirkan</i>		06. SC-03A.pdf
7.	Salinan bukti pengumuman dan/atau undangan Tender	<i>Lampirkan</i>		07. Pengumuman.pdf
8.	Salinan berita acara hasil penilaian kualifikasi (dalam hal dilakukan pelelangan umum)	<i>Lampirkan</i>		08. BA Kualifikasi.pdf
9.	Salinan pemberitahuan hasil penilaian kualifikasi (dalam hal dilakukan pelelangan umum)	<i>Lampirkan</i>		09. Pengumuman Kualifikasi.pdf
10.	Salinan korespondensi dan/ atau risalah rapat penyelesaian protes terhadap hasil penilaian kualifikasi (jika ada dan jika dilakukan pelelangan umum)	<i>Lampirkan</i>		10. Korespondensi Protes.pdf
11.	Salinan berita acara/risalah rapat pemberian penjelasan	<i>Lampirkan</i>		11. BA Pemberian Penjelasan.pdf
12.	Salinan berita acara/risalah rapat pembukaan penawaran antara lain: <ul style="list-style-type: none">• Satu Sampul• Sampul-I• Sampul-II• Tahap-I• Tahap-II	<i>Lampirkan</i>		12. BA Pembukaan Penawaran.pdf
13.	Salinan berita acara evaluasi teknis	<i>Lampirkan</i>		13. BA Evaluasi Teknis.pdf
14.	Salinan pengumuman/ pemberitahuan hasil evaluasi teknis	<i>Lampirkan</i>		14. Pengumuman Evaluasi Teknis.pdf
15.	Salinan korespondensi dan/atau risalah rapat penyelesaian sanggahan atas hasil evaluasi teknis (jika ada)	<i>Lampirkan</i>		15. Korespondensi Sanggahan Evaluasi Teknis.pdf
16.	Salinan berita acara negosiasi	<i>Lampirkan</i>		16. BA Negosiasi.pdf
17.	Salinan Hasil Evaluasi Penawaran sampai dengan peringkat ketiga (Jika Peserta Tender lebih dari satu)	<i>Lampirkan</i>		17. HEP.pdf
18.	Salinan berita acara hasil evaluasi komersial	<i>Lampirkan</i>		18. BA Evaluasi Komersial.pdf



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 28 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

19.	Salinan pengumuman/pemberitahuan penetapan calon pemenang	Lampirkan		19. Pengumuman Calon Pemenang.pdf
20.	Salinan korespondensi dan/atau risalah rapat penyelesaian sengkahan termasuk sengkahan banding atas hasil penetapan pemenang (jika ada)	Lampirkan		20. Korespondensi Sanggahan Pengumuman Pemenang.pdf
21.	Dokumen penawaran dari Peserta Tender yang ditetapkan sebagai calon pemenang oleh KONTRAKTOR KKS	Lampirkan		21. Dokumen Penawaran.pdf
22.	Salinan surat penggunaan rekening Bank BUMN/BUMD untuk pembayaran	Lampirkan		22. Bank BUMN atau BUMD.pdf
23.	Salinan Lampiran Pernyataan TKDN calon pemenang (original dan hasil negosiasi apabila ada)	Lampirkan		23. Pernyataan TKDN.pdf
24.	Salinan Jaminan Penawaran (<i>bid bond</i>) dari calon pemenang tender (apabila disyaratkan)	Lampirkan		24. Jaminan Penawaran.pdf
25.	Apabila harga penawaran yang dipilih di bawah 80% (delapan puluh persen) HPS/OE, harus menyampaikan Dokumen Analisa kewajaran harga berdasarkan analisa pasar	Lampirkan		25. Analisa Penawaran dibawah 80 persen.pdf
26.	Salinan HPS/OE yang telah disahkan dan/atau Salinan HPS/OE revisi (jika ada) beserta justifikasi	Lampirkan		26. HSP.pdf
27.	Salinan tabulasi perbandingan rincian penawaran harga calon pemenang dengan rincian HPS/OE atau HPS/OE Revisi	Lampirkan		27. Tabulasi HPS dan Penawaran.pdf

Keterangan:

1. Setiap pengajuan persetujuan hasil pelaksanaan Tender harus menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Lampiran 6 dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* secara lengkap dan benar.
2. Dokumen hasil pelaksanaan Tender dalam bentuk *hardcopy* harus disampaikan dalam binder warna biru, diberi pembatas dan nama seperti pada kolom e untuk setiap jenis dokumen.
3. Dokumen hasil pelaksanaan Tender dalam bentuk *softcopy* harus disampaikan dalam dalam CD-R atau DVD-R, diberi identitas nama KONTRAKTOR KKS, Judul Tender dan No. Tender. Format file dibuat dalam bentuk PDF hasil scan dokumen aslinya, dan masing-masing jenis dokumen dibuat dalam file terpisah dengan nama seperti pada kolom 'e'.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 29 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

5. Kolom 'd' diisi oleh petugas loket Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa BPMA.
6. No. Daftar Pengadaan (NDP) nomor yang diperoleh dari sistem BPMA.
7. No. Rencana Tender (NRT) nomor yang diperoleh dari sistem BPMA.
8. No. Hasil Tender (NHT) nomor yang diperoleh dari sistem BPMA.

Disiapkan oleh: <i>[Nama KONTRAKTOR KKS]</i>	Diperiksa Oleh: Petugas Locket
Tandatangan	Tandatangan
Nama Lengkap: Tanggal:	Nama Lengkap: Tanggal:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 30 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

**LAMPIRAN 7
SC-05 CHECKLIST PERUBAHAN LINGKUP KONTRAK (PLK)**

Nama KONTRAKTOR KKS				
No. Tender				
Judul Tender				
No. Rencana Tender (NRT)				
No. Hasil Tender (NHT)				
No. PLK (NPL)				
No	Dokumen	Keterangan / Catatan	Status (Ada / Tidak Ada/ Tidak Perlu)	Nama File Lampiran (dalam format pdf)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
1.	SC-05	<i>Lampirkan</i>		01. SC-05.pdf
2.	Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang KONTRAKTOR KKS	<i>Lampirkan</i> <i>Tuliskan informasi berikut disini:</i> <i>a. Nomor surat:</i> <i>b. Tanggal surat:</i> <i>c. No. Kontrak:</i> <i>d. Judul Kontrak:</i> <i>e. Dasar PLK:</i> <i>f. Penjelasan singkat PLK:</i> <i>g. Nilai Kontrak Awal:</i> <i>h. Jangka Waktu Kontrak Awal</i> <i>i. Nilai Kontrak Setelah PLK</i> <i>j. Jangka Waktu Kontrak Setelah PLK</i> <i>k. Nilai PLK yang diusulkan dan persentase terhadap nilai kontrak awal</i> <i>l. Nilai PLK yang diusulkan dan persentase terhadap nilai kontrak total kumulatif</i> <i>m. Nama Penyedia Barang/Jasa</i> <i>n. Komitmen TKDN:</i> <i>o. Narahubung (contact person): sebutkan nama, email, nomor telepon/HP</i> <i>Catatan:</i> <i>Surat pengantar berisi sekurang-kurangnya informasi diatas</i>		02. Surat Pengantar.pdf
3.	Daftar Isi	<i>Lampirkan</i>		03. Daftar Isi.pdf
4.	Salinan Kontrak awal	<i>Lampirkan</i>		04. Kontrak Awal.pdf
5.	Salinan amendemen Kontrak dan/atau konsep amendemen Kontrak, baik	<i>Lampirkan</i>		05. Amendemen Kontrak.pdf

	PLK yang lalu maupun yang baru			
6.	Pendapat tertulis fungsi terkait KONTRAKTOR KKS yang dilengkapi dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan disetujui oleh Pejabat Berwenang KONTRAKTOR KKS	<i>Lampirkan</i>		06. Justifikasi.pdf
7.	Persetujuan/pendapat dari fungsi terkait BPMA sesuai ketentuan yang berlaku	<i>Lampirkan Catatan: Dokumen persetujuan/pembahasan rencana kerja/kegiatan dari fungsi terkait BPMA;</i>		07. Persetujuan Teknis.pdf
8.	Dokumen pendukung yang memperkuat justifikasi/ alasan diperlukannya PLK	<i>Lampirkan</i>		08. Dokumen Pendukung.pdf
9.	Berita acara negosiasi dan/ atau harga penawaran akhir hasil negosiasi (apabila PLK sudah dilaksanakan)	<i>Lampirkan</i>		09. BA Negosiasi.pdf
10.	Korespondensi dengan Penyedia Barang/Jasa tentang PLK	<i>Lampirkan</i>		10. Korespondensi .pdf
11.	Revisi formulir pernyataan TKDN (apabila PLK sudah dilaksanakan)	<i>Lampirkan</i>		11. Pernyataan TKDN.pdf
12.	SC-06	<i>Lampirkan</i>		12. SC-06.pdf

Keterangan:

1. Setiap pengajuan persetujuan Perubahan Lingkup Kerja (PLK) harus menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Lampiran 7 dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* secara lengkap dan benar.
2. Dokumen Perubahan Lingkup Kerja (PLK) dalam bentuk *hardcopy* harus disampaikan dalam binder warna merah, diberi pembatas dan nama seperti pada kolom e untuk setiap jenis dokumen.
3. Dokumen Perubahan Lingkup Kerja (PLK) dalam bentuk *softcopy* harus disampaikan dalam dalam CD-R atau DVD-R, diberi identitas nama KONTRAKTOR KKS, Judul Kontrak dan No. Kontrak. Format file dibuat dalam bentuk PDF hasil scan dokumen aslinya, dan masing-masing jenis dokumen dibuat dalam file terpisah dengan nama seperti pada kolom 'e'.
4. Kolom 'd' diisi oleh petugas loket Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa BPMA.
5. No. Rencana Tender (NRT) nomor yang diperoleh dari sistem BPMA.
6. No. Hasil Tender (NHT) nomor yang diperoleh dari sistem BPMA.
7. No. PLK (NPL) nomor yang diperoleh dari sistem BPMA.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 32 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

Disiapkan oleh: <i>[Nama KONTRAKTOR KKS]</i>	Diperiksa Oleh: Petugas Loker
Tandatangan	Tandatangan
Nama Lengkap: Tanggal:	Nama Lengkap: Tanggal:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 33 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

LAMPIRAN 8

SC-06 DAFTAR PERUBAHAN LINGKUP KERJA (PLK)

Lampiran SC-06 DAFTAR PERUBAHAN LINGKUP KERJA (PLK)		Keterangan Perubahan Lingkup Kerja		Tanggal Akhir Kontrak		Kode Mata Uang dalam Kontrak	Kurs USD	Rincian Persetujuan Anggaran PKL		Nilai				
No.	Nomor PLK/KKKS	Penambahan/Pengurangan	Alasan Perubahan	Referensi Persetujuan Fungsi Terkait BPMA	Sebelum PKL			Setelah PKL	Referensi Persetujuan Fungsi Terkait BPMA	Nilai (USD)	Referensi Persetujuan Fungsi Terkait BPMA	Sesuai Kontrak (USD)	Penawaran (USD)	Hasil Negosiasi (USD)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	n	o	p	q
Nama KKKS : No. Kontrak : Judul Kontrak : Nilai Kontrak : Dasar Anggaran (Awal) : Nilai Persetujuan Anggaran (Awal) : Dasar Anggaran PKL : Nilai Persetujuan Anggaran PKL : Nilai Usulan PKL : Persentase nilai PKL (%) : Total Nilai Kontrak setelah PKL : Masa Berlaku Kontrak Setelah PKL : No. Rencana Tender (NRT) : No. hasil Tender (NHR) : No. PKL :														
														Total



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 34 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

**LAMPIRAN 9
SC-07 LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER BARANG**

**Lampiran SC-07
LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER BARANG**

Nama KONTRAKTOR KKS :

Bulan :

Tahun :

Nilai Tender

No	Nilai	Jumlah Tender	Nilai kontrak	
			US\$	%
1	Nilai > US\$100 juta			
2	US\$20 juta < Nilai ≤ US\$100 juta			
3	US\$5 Juta < Nilai ≤ US\$20 juta			
4	2 juta < Nilai ≤ US\$5 juta			
5	US\$500 ribu < Nilai ≤ US\$2 juta			
6	Nilai ≤ US\$500ribu			
Total				

Metode Pelaksanaan Tender

No	Metode	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN%
			US\$	%	
1	Pelelangan Umum				
2	Pelelangan Terbatas				
3	Pelelangan Sederhana				
4	Pemilihan Langsung				
5	Penunjukan Langsung				
Total					

Jenis Komoditas

No.	Jenis Komoditas	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN%	Target Capaian TKDN Barang *
			US\$	%		
1	1.a. Pipa Pemboran (OCTG) <i>High Grade</i>					
2	1.b. Pipa Pemboran (OCTG) <i>Low Grade</i>					
3	2.a. Pipa Penyalur (linepipe) Spiral/SAW					
4	2.b. Pipa Penyalur (linepipe) ERW					
5	2.c. Pipa Penyalur (linepipe) <i>Seamless Pipe</i>					
6	3. Lumpur pemboran, semen dan bahan kimia					
7	4. <i>Electrical Submersible Pump</i>					
8	5. <i>Pumping Unit</i>					
9	6. <i>Machinery & Equipment</i>					
10	7.a. <i>Wellhead</i> dan <i>X-mas tree</i> Darat					
11	7.b. <i>Wellhead</i> dan <i>X-mas tree</i> Laut					
12	8. Bahan Bakar Minyak (BBM)					
13	9. Pelumas					
14	10. Barang lain-lain					
Total						

*) Target Capaian TKDN berdasarkan Permen ESDM No.15 Tahun 2013



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 35 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

Golongan Usaha Penyedia Barang

No	Golongan Penyedia Barang/Jasa	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN%
			US\$	%	
1	Usaha Besar				
2	Usaha Menengah				
3	Usaha Kecil				
Total					

Status Perusahaan Penyedia Barang

No	Status Perusahaan	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN%
			US\$	%	
1	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)				
2	Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN)				
3	Perusahaan Nasional (PN)				
Total					

Lokasi Tender

No	Lokasi Pengadaan	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN%
			US\$	%	
1	Daerah				
2	Pusat				
Total					

Bank Pembayaran

No	Bank Pembayaran	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN%
			US\$	%	
1					
2					
3					
4					
5					
Total					



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 37 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

LAMPIRAN 11

SC-09 LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER JASA

Lampiran SC-09

LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER JASA

Nama KONTRAKTOR KKS :

Bulan :

Tahun :

Nilai Tender

No	Nilai	Jumlah Tender	Nilai kontrak	
			US\$	%
1	Nilai > US\$100 juta			
2	US\$20 juta < Nilai ≤ US\$100 juta			
3	US\$5 Juta < Nilai ≤ US\$20 juta			
4	2 juta < Nilai ≤ US\$5 juta			
5	US\$500 ribu < Nilai ≤ US\$2 juta			
6	Nilai ≤ US\$500ribu			
Total				

Metode Pelaksanaan Tender

No	Metode	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN%
			US\$	%	
1	Pelelangan Umum				
2	Pelelangan Terbatas				
3	Pelelangan Sederhana				
4	Pemilihan Langsung				
5	Penunjukan Langsung				
Total					

Jenis Komoditas

No.	Jenis Komoditas	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN%	Target Capaian TKDN Jasa % *
			US\$	%		
1	1.a. Jasa Survei, Seismik dan Studi Geologi Darat					
2	1.b. Jasa Survei, Seismik dan Studi Geologi Laut					
3	2.a. Jasa Pemboran Darat					
4	2.b. Jasa Pemboran Laut					
5	3.a. Jasa <i>Front End Engineering Design</i> (FEED) Darat					
6	3.b. Jasa <i>Front End Engineering Design</i> (FEED) Laut					
7	4.a. Jasa Pemborongan <i>Engineering Procurement Construction Installation</i> (EPCI) Darat					
8	4.b. Jasa Pemborongan <i>Engineering Procurement Construction Installation</i> (EPCI) Laut					
9	5. Jasa Perkapalan					
10	6. Jasa Pesawat Udara					
11	7. Jasa lain-lain					
Total						

*) Target Capaian TKDN berdasarkan Permen ESDM No.15 Tahun 2013



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 38 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

Golongan Usaha Penyedia Jasa

No	Golongan Penyedia Barang/Jasa	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN%
			US\$	%	
1	Usaha Besar				
2	Usaha Menengah				
3	Usaha Kecil				
Total					

Status Perusahaan Penyedia Jasa

No	Status Perusahaan	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN%
			US\$	%	
1	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)				
2	Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN)				
3	Perusahaan Nasional (PN)				
4	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri (LPDN-PDN)				
5	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai <i>leadfirm</i> dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PN)				
6	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai <i>leadfirm</i> dengan Perusahaan Asing (LPDN-PA)				
7	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai <i>leadfirm</i> dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (LPDN-PN-PA)				
8	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai <i>leadfirm</i> dengan Perusahaan Nasional (PDN-PN)				
9	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai <i>leadfirm</i> dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (PDN-PN-PA)				
Total					

Lokasi Tender

No	Lokasi Pengadaan	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN%
			US\$	%	
1	Daerah				
2	Pusat				
Total					

Bank Pembayaran

No	Bank Pembayaran	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN%
			US\$	%	
1					
2					
3					
4					
5					
Total					



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Halaman 40 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

LAMPIRAN 13

SC-11 RINGKASAN PERUBAHAN LINGKUP KONTRAK (PLK)

Lampiran SC-11
RINGKASAN PELAKSANAAN PERUBAHAN LINGKUP KERJA (PLK) / PERPANJANGAN JANGKA WAKTU KONTRAK (PJWK)

Kode KKKS :

Bulan : _____

Tahun : _____

No.	No. Daftar Perencanaan (NDP)	No. Rencana Tender (NRT)	No. Hasil Tender (NHT)	No. Tender	No. Kontrak	Judul Kontrak	Nomor Persetujuan Hasil Pelaksanaan Terkait BPMA jika ada	Keterangan Perubahan Lingkup Kerja		Tanggal Akhir Kontrak		Referensi Persetujuan Fungsi Terkait BPMA	Kode Mata Uang dalam Kontrak	Kurs Terkait USD	Persetujuan Anggaran PLK/PJWK			Nilai					
								Penambahan	Pengurangan	Alasan Perubahan	Referensi Persetujuan Fungsi Terkait BPMA				Sebelum PLK/PJWK	Setelah PLK/PJWK	Nilai (USD)	Referensi Persetujuan Fungsi Terkait BPMA	Sesuai Kontrak (USD)	Penawaran (USD)	Hasil Negosiasi (USD)	Perbedaan (USD)	Persentase PLK (%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	
Total																							



PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA

Halaman 45 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

LAMPIRAN 18

SC-16 LAPORAN PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

LAPORAN PEMAKAIAN BBM

Kode KKKS :

Bulan :

Tahun :

NO	ITEMNUM (KODE MATERIAL)	JENIS	KETERANGAN RENCANA KEBUTUHAN	SATUAN	RENCANA/REALISASI BULAN INI	
					R1 (Rencana)	R2 (Realisasi)
A. DALAM NEGERI						
1						
2						
3						
B. IMPOR						
1						
2						

Catatan: R1 - RENCANA , R2-REALISASI



PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA

Halaman 46 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

LAMPIRAN 19
SC-17 LAPORAN PEMAKAIAN PELUMAS

LAPORAN PEMAKAIAN PELUMAS

Kode KKKS :

Bulan :

Tahun :

NO	ITEMNUM (KODE MATERIAL)	JENIS	KETERANGAN RENCANA KEBUTUHAN	SATUAN	RENCANA/REALISASI BULAN INI	
					R1 (Rencana)	R2 (Realisasi)
A. DALAM NEGERI						
1						
2						
3						
B. IMPOR						
1						
2						

Catatan: R1 - RENCANA , R2-REALISASI



PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA

Halaman 47 dari 44

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

LAMPIRAN 20
SC-18 LAPORAN PEMAKAIAN BASE MUD

LAPORAN PEMAKAIAN BASE MUD

Kode KKKS :

Bulan :

Tahun :

NO	ITEMNUM (KODE MATERIAL)	JENIS	KETERANGAN RENCANA KEBUTUHAN	SATUAN	RENCANA/REALISASI BULAN INI	
					R1 (Rencana)	R2 (Realisasi)
A. DALAM NEGERI						
1						
2						
3						
B. IMPOR						
1						
2						

Catatan: R1 - RENCANA , R2-REALISASI